

SKRIPSI

**STUDI PENERAPAN KODE ETIK PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS
KEARIFAN LOKAL BUDAYA BUGIS “MALEMPU’ NA MAPACCING” DI
KELURAHAN TELLUMPANUA KAB.PINRANG**



OLEH

**HERAWATI
NIM :2020203862201024**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**STUDI PENERAPAN KODE ETIK PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS
KEARIFAN LOKAL BUDAYA BUGIS “MALEMPU’ NA MAPACCING” DI
KELURAHAN TELLUMPANUA KAB.PINRANG**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
(S.Tr,Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

OLEH

HERAWATI

NIM: 2020203862201024

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Studi Penerapan Kode Etik Pelaporan Keuangan Berbasis Kearifan Lokal Budaya Bugis “*Malempu Na Mapaccing*” Di Kelurahan Tellumpunua Kab.Pinrang

Nama Mahasiswa : Herawati

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862201024

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2523/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Abdul Hamid, S.E., M.M.

NIP : 19720929 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., ACPA., CTA

NIDN : 2003029203

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Studi Penerapan Kode Etik Pelaporan Keuangan Berbasis Kearifan Lokal Budaya Bugis “Malempu’ Na Mapaccing” Di Kelurahan Tellumpanua Kab. Pinrang

Nama Mahasiswa : Herawati

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862201024

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2523/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023

Tanggal Kelulusan :

Disahkan oleh Komisi Penguji

Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Ketua)	
Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., ACPA., CTA	(Sekertaris)	
Dr. Andi Bahri S., M.E., M. FiL.I.	(Anggota)	
Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, M.M.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hj. Mahirah dan Ayahanda H. Halide tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku pembimbing I dan Ibu Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., ACPA., CTA selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Semua Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Ilham Yusuf sebagai Support System penulis yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan.
5. Sahabat Nur Ellyza Ahmad, Ipa Tri Hapsari, Jamilah, Indri Julia Hajar dan Ulfa jabir sebagai Support System penulis yang memberikan dukungan dan dorongan hingga tulisan ini dapat diselesaikan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Oktober 2023

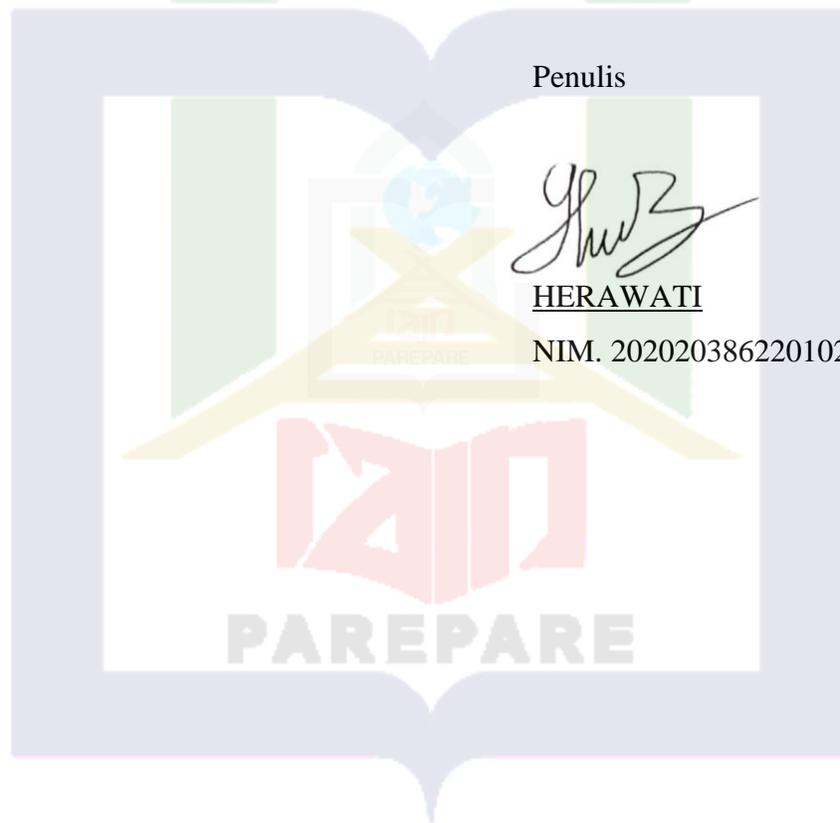
12 Rabi'ul Akhir 1445 H

Penulis



HERAWATI

NIM. 2020203862201024



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

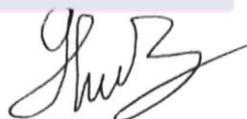
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Herawati
NIM : 2020203862201024
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 12 Desember 2001
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Studi Penerapan Kode Etik Pelaporan Keuangan Berbasis Kearifan Lokal Budaya Bugis “ *Malempu’ Na Mapaccing*” Di Kelurahan Tellumpanua Kab. Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Oktober 2023

Penyusun,



HERAWATI

NIM. 2020203862201024

ABSTRAK

Herawati. *Studi Penerapan Kode Etik Pelaporan Keuangan Berbasis Kearifan Lokal Budaya Bugis “ Malempu’ Na Mapaccing” Di Kelurahan Tellumpanua Kab.Pinrang.* (dibimbing oleh Abdul Hamid dan A. Ayu Frihatni).

Dana Kelurahan merupakan DAU (Dana Alokasi Umum) tambahan yang dianggarkan oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Namun, proses dana kelurahan yang besar sebenarnya tidak sejalan dengan pengelolaannya yang baik. Faktanya, masih banyak kasus penyelewengan dana kelurahan di beberapa daerah. Kearifan lokal dapat dijadikan sebagai sebuah landasan dalam mengatasi hal tersebut salah satunya adalah kearifan lokal nilai hidup suku bugis yaitu *malempu’ na mapaccing*.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang datanya diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak yang kompeten dalam pengelolaan Dana Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa dan data sekunder diperoleh dari buku, dokumen, dan jurnal/skripsi penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Pemerintah Kelurahan Tellumpanua menggunakan sistem Akuntansi dalam mengelola dana kelurahan. Sistem akuntansi yang digunakan ada dua yaitu manual dan melalui penginputan pada aplikasi khusus yaitu SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah). Kemudian pelaporannya pada akhir tahun dengan memaparkan LPJ lalu diteruskan ke kecamatan, lalu kabupaten, selanjutnya provinsi dan terakhir ke pusat. *Kedua*, kearifan lokal *malempu’ na mapaccing* menjadi landasan dalam mengelola dana kelurahan dimana pemerintah kelurahan mengupayakan memiliki kejujuran dan kebersihan dalam pelaporan keuangan kelurahan.

Kata Kunci : Kearifan Lokal, *Malempu’ Na Mapaccing* , Kode Etik Pelaporan, Kelurahan.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori	12
1. Teori Fenomenologi.....	12
2. Teori Behaviour	17
C. Kerangka Konseptual	20
1. Kearifan Lokal	20
2. Kode Etik Akuntansi.....	25
3. Pelaporan Keuangan	29
D. Kerangka Berpikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis penelitian.....	37

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Uji Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Bentuk penerapan,kode etik pelaporan keuangan di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang.....	444
B.Peran Kearifan lokal <i>malempu' na mapaccing</i> pada pelaporan keuangan di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang	50
BAB V PENUTUP.....	60
A. Simpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68
PEDOMAN WAWANCARA.....	78
BIODATA PENULIS	86

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Berpikir	36



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	RKPA-SKPD 2019 Kelurahan Tellumpanua Kab. Pinrang	45
4.2	RKPA-SKPD 2020 Kelurahan Tellumpanua Kab. Pinrang	46
4.3	RKPA-SKPD 2021 Kelurahan Tellumpanua Kab. Pinrang	46
4.4	RKPA-SKPD 2022 Kelurahan Tellumpanua Kab. Pinrang	47



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	67
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	68
3	Surat Keterangan Telah Meneliti	69
4	Surat Keterangan Wawancara	70
5	Instrument Penelitian/Pedoman Wawancara	76
6	Data Mentah Penelitian	78
7	Foto Dokumentasi Wawancara	81
8	Biodata Penulis	84



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab direpresentasikan melalui sistem tulisan Arab menggunakan huruf-huruf, namun dalam transliterasi, beberapa fonem dilambangkan dengan huruf, beberapa dengan tanda, dan yang lainnya dengan kombinasi huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke

			atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Qaf	K	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, di tulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) dalam bahasa Arab yang disimbolkan dengan tanda atau harakat disebut sebagai “Huruf Hijaiyah Mati” atau “sukun”, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) dalam bahasa Arab direpresentasikan oleh gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi sebagai kombinasi huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفٌ : kaifa

حَوْلٌ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang ditandai dengan harkat dan huruf, dapat diuraikan menjadi huruf dan tanda dalam transliterasi, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتٌ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, disebut dengan huruf yang memiliki tanda baca (harakat) fathah, kasrah, dan damah, transliterasinya adalah [t].

2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun adalah huruf “ha” yang berada pada akhir kata tanpa adanya tanda baca atau tanda baca mati, transliterasinya adalah [h].

Jika dalam kata terakhir, *ta martabudah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta martabudah* itu ditransliterasikan sebagai *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem penulisan Arab ditandai dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dapat diparafrase dalam transliterasi dengan menggunakan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Dalam sistem penulisan Arab, kata sandang direpresentasikan oleh huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang, *al-*, tetap ditransliterasikan secara standar, baik setelah huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ini tidak memengaruhi pengucapan langsung dari huruf yang mengikutinya. Selain itu, kata sandang dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>as-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi mengamanatkan penggunaan apostrof (') untuk hamzah ditengahdan akhir kata, tetapi hamzah diawal kata tidak diwakili, karena dalam tulisan Arab, hamzah awal biasanya muncul sebagai huruf alif. Contoh:

تَامُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan ungkapan yang belum disesuaikan secara resmi dalam bahasa Indonesia. Ungkapan-ungkapan tersebut tidak lagi diubah dari bentuk transliterasi ketika sudah umum digunakan

dalam konteks berbahasa Indonesia atau sering muncul dalam tulisan berbahasa Indonesia, seperti Al-Qur'an dan sunnah. Namun, apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks Arab, penting untuk tetap menggunakan transliterasi secara penuh, Contoh:

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Ketika kata “Allah” didahului oleh partikel seperti huruf jar atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), transliterasinya tanpa huruf hamzah, Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Dalam transliterasi ini, meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, kita tetap menggunakan huruf kapital sesuai dengan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD), contohnya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri, baik itu orang, tempat, atau bulan, serta huruf pertama pada awal kalimat. Jika nama diri diawali oleh kata sandang “al-“, huruf awal nama diri tetap menggunakan huruf kapital, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika “al-“ berada diawal kalimat, huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-), Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Naṣr al-Farabī

Jika seseorang memiliki nama resmi dengan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhir, maka dalam daftar pustaka atau daftar referensi, kedua nama terakhir tersebut harus disebutkan sebagai nama akhir, Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>sallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحه

دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Kerana dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Digunakan untuk mencerminkan jumlah jilid dalam buku atau ensiklopedia berbahasa Inggris, sementaradalam buku berbahasa Arab, istilah yang sering digunakan adalah “juz”.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kelurahan yang akan menerima Dana Alokasi Umum dari pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2019. Pengelolaan dana Kelurahan di mulai dari perencanaan program, dilanjutkan dengan pelaksanaan, dan setelah itu pertanggungjawaban dilakukan. Pengelolaan dana kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan program-program prioritas yang diterapkan oleh pemerintahan kelurahan. Kegiatan yang fokus pada peningkatan keberdayaan masyarakat di Kelurahan Tellumpanua lebih berfokus pada pembangunan fisik. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam tahap perencanaan ini tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum, yang menyebabkan kurangnya transparansi. Ketidakadilan ini muncul karena kurangnya kesadaran dikalangan masyarakat, yang tampak dari hasil wawancara awal dengan beberapa penduduk setempat. Hal ini menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang didanai oleh kelurahan.

Kelurahan Tellumpanua telah melakukan pembangunan fisik menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan, seperti pembuatan jalan beton dilorong-lorong dan konstruksi sistem drainase. Drainase ini dirancang untuk mengalirkan air hujan secara alami atau buatan, baik dari permukaan maupun bawah permukaan, guna mengelola air yang ada di wilayah tersebut. Meskipun demikian, pengorganisasian di tingkat kelurahan sekarang ini dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam konteks aspek sosial budaya yang

memainkan peran signifikan status masyarakat adat, demokratisasi, keterlibatan masyarakat, serta perkembangan dan pemerataan pembangunan. Masalah juga termasuk ketegangan antar wilayah. Dalam konteks pemerataan pembangunan, Kelurahan Tellumpanua sering menerima kritik, seperti yang disampaikan oleh beberapa warga dalam hasil wawancara. Salah satunya contohnya adalah masalah dengan penyediaan air oleh sistem Pamsimas yang sering mengalami gangguan, seperti air yang tidak mengalir kerumah-rumah warga. Warga telah mengadukan masalah ini kepada pengurus Pamsimas, namun masih ada keluhan yang belum terselesaikan.

Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018, yang membicarakan tentang pengembangan infrastruktur di tingkat kelurahan. Dalam pasal 3 ayat 1, dijelaskan bahwa pembangunan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberian layanan sosial dasar. (Yolanda Permata Sari,2021)¹

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 dirancang untuk memberikan bantuan finansial kepada pemerintah daerah melalui prosedur penyaluran dana alokasi umum tambahan pada tahun anggaran 2020 guna memenuhi kebutuhan anggaran kelurahan, seperti program pemberdayaan masyarakat kelurahan.² Penyaluran dana kelurahan kesetiap kabupaten/kota dilakukan berdasarkan kategori layanan dasar publik di daerah tersebut, sehingga tiap wilayah akan menerima alokasi tambahan yang berbeda dari dana umum.

¹ Yolanda Permata Sari, “Implementasi Dana Kelurahan Untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pada Masa Covid-19 Di Kota Metro”, *Jurnal Ilmiah Jatinangor*,2021.

² Yolanda Permata Sari,“Implementasi Dana Kelurahan Untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pada Masa Covid-19 Di Kota Metro”, :*Jurnal Ilmiah,Jatinangor*,2021.

Menurut pernyataan Presiden Joko Widodo, ada peningkatan perhatian terhadap kelurahan dalam masa pemerintahannya. Sebagai bagian dari struktur kecamatan yang bertanggungjawab atas layanan masyarakat, kelurahan kini menerima tambahan anggaran yang disebut dana kelurahan. Berdasarkan wawancara dengan divisi keuangan, kelurahan tellumpanua dinilai positif dan mendapatkan dana sekitar Rp 352.941.000 per kelurahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018 mengenai pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan, mengungkapkan bahwa dana kelurahan berasal dari Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU Tambahan)³. Oleh karena itu, penting untuk memantau sistem pengaliran dana kelurahan dengan ketat agar dapat mencegah kerugian dan tindakan kecurangan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor utama yang mendorong seseorang melakukan penyelewengan dana meliputi tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Tekanan dapat berasal dari kondisi ekonomi yang sulit, gaya hidup konsumtif, dan lingkungan yang memicu tekanan. Peluang timbul akibat lemahnya pengawasan keuangan, minimnya partisipasi masyarakat, dan rendahnya tingkat pendidikan, memudahkan terjadinya kecurangan. Rasionalisasi muncul saat seseorang meyakini bahwa tindakannya sah dan memiliki hak serta wewenang atas dana tersebut, seringkali dengan pemikiran pendek bahwa dia akan menggantinya suatu saat nanti.

Mengingat dalam rangka menilai kesehatan suatu lembaga, pentingnya pelaporan keuangan yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pembuatan laporan

³ ¹Mashuri,²Suwarno³Teguh Pramono, "Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Perspektif Community Driven Development", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*, Vol.4 No.1 Tahun 2020.

keuangan harus dilakukan dengan hati-hati, tanpa bias, dan mematuhi norma akuntansi yang berlaku adalah kewajiban penting. Di Indonesia, standar akuntansi mencakup Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).⁴

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Tellumpunua Kabupaten Pinrang, karena perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasinya. Kelurahan Tellumpunua memiliki penduduk dari Suku Bugis yang masih sangat kuat dalam menjalankan adat dan tradisi mereka, meskipun telah mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu. Masalah yang muncul adalah adanya masalah komunikasi yang kurang efektif antara pihak kelurahan dan masyarakat setempat, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan kelurahan, yang seharusnya melibatkan mereka. Selain itu, aspek etika juga menjadi perhatian, terutama dalam konteks penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana peran seorang akuntan menjadi sangat penting.

Lemahnya internal value, merujuk pada ketidakkuatan nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang. Nilai-nilai ini mencerminkan keyakinan yang memengaruhi tindakan individu. Namun ketidakseimbangan dalam pendidikan dapat mengakibatkan manusia menjadi sombong, eksentrik, egois, individualistik, materialistik, dan terlalu fokus pada hal-hal duniawi, sehingga melupakan nilai-nilai kearifan lokal seperti kebersamaan, kesopanan, kebaikan, agama, dan gotong royong adalah pilar-pilar yang penting dalam karakter bangsa. Dengan setiap

⁴ Ayuk Yuliana, "PENERAPAN STANDAR PELAPORAN KEUANGAN SERTA HUBUNGANNYA DENGAN ETIKA DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN", 10.2 (2023).

individu menjaga nilai-nilai ini, peluang terjadinya kecurangan dapat berkurang karena adanya perhatian yang kuat terhadap sesama.

Salah satu aspek penting dalam melestarikan kearifan lokal adalah mempertahankan nilai-nilai kehidupan. Kearifan lokal adalah pola hidup yang berkembang dalam suatu komunitas dan diturunkan kepada generasi berikutnya. Ini karena dalam budaya lokal dan seni budaya terdapat banyak ajaran tentang caea hidup, yang membantu membentuk kepribadian setiap individu.

Salah satu aspek penting dari budaya Sulawesi Selatan adalah mengedepankan nilai hidup atau prinsip-prinsip masyarakatnya. Salah satu prinsip yang dikenal di wilayah ini adalah *Malempu' na Mapaccing*, yang merupakan bagian integral dari budaya Bugis-Makassar. Dalam ajaran tradisional Bugis-Makassar, terdapat pepatah yang mengatakan “*dua naompo' adecengeng e; alempureng, appaccingenge,*” yang mengandung makna bahwa kejujuran dan kebersihan memiliki peranan penting dalam menciptakan kepercayaan, memperluas hubungan, dan membuat keputusan yang bijak.⁵ Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini yaitu *Malempu' na Mapaccing* harus diperhatikan dan dijunjung tinggi oleh individu dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bermaksud ingin mengetahui nilai keunggulan “*Malempu' Na Mapaccing*” sebagai landasan dalam pelaporan keuangan di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang serta menganalisis bagaimana penerapan standar pelaporan keuangan untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas dan dapat di percaya, Sehingga

⁵ Sa'adal Jannah “Internalisasi Nilai-Nilai Macca Na Malempu' Dalam Etika Bisnis Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pelanggan CV. Idlan Waranie Perkasa (Mabello Indonesia)” *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, No. 2 (2020)

peneliti melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan Studi Penerapan Kode Etik Pelaporan Keuangan Berbasis Kearifan Lokal Budaya Bugis *Malempu' Na Mapaccing* Di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penerapan, kode etik pelaporan keuangan di Kelurahan Tellumpanua?
2. Bagaimana peran kearifan lokal "*Malempu' Na Mapaccing*" pada pelaporan keuangan di Kelurahan Tellumpanua Kab. Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pemerintah Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang sudah menerapkan kode etik pelaporan keuangan dan untuk mengetahui peran *Malempu' Na Mapaccing* pada pelaporan keuangan di Kelurahan Tellumpanua.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk meluaskan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan tentang implementasi kode etik pelaporan keuangan dalam pengelolaan dana kelurahan, dapat dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dengan nilai-nilai kearifan lokal; dan

b. Sebagai sumber informasi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diinginkan untuk menjadi dasar evaluasi dan pertimbangan terkait penerapan etika dalam pelaporan keuangan pada pengelolaan dana kelirahan, dengan harapan dapat memberikan manfaat dimasa depan.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini bertujuan untuk meluaskan pemahaman dan membandingkan antara pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dengan situasi nyata, serta memberikan pengalaman tambahan kepada penulis dalam memahami kultur budaya Bugis *Malempu' Na Mapaccing* dalam konteks penerapan kode etik pelaporan keuangan pada pengelolaan dana di Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini berpotensi menjadi pedoman yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pembaca, serta diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berguna dalam menyusun tugas akhir terkait dengan kode etik pelaporan keuangan di Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat kemungkinan adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Judul penelitian sebelumnya menjadi dasar perbandingan dalam penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nasruddin dengan judul “Kearifan Lokal Dalam Pappaseng Bugis”. Mengungkapkan temuan kearifan lokal, seperti kejujuran, keteguhan, sirik,, etos kerja, gotong royong, dan solidarita. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dalam pappaseng tetap relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, penting untuk meremajakan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas bangsa, terutama untuk generasi muda yang tengah menghadapi tantangan global saat ini dan dimasa depan.⁶ Perbedaan penelitian Nasruddin dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objek dan fokus penelitian. Nasruddin meneliti persepsi masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa yang partisipatif berbasis kearifan lokal, sementara peneliti lebih spesifik dalam menganalisis penerapan kode etik pelaporan keuangan berbasis kearifan lokal budaya bugis di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang, dengan fokus pada nilai *Malempu’ na Mapaccing*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Alifka.R dengan judul “Analisis Falsafah Budaya Bugis *Mapaccing, Malempu Na Magetteng* Dalam Pengelolaan Dana

⁶ Nasruddin, 2010, “Kearifan Lokal Dalam Pappaseng Bugis (Local Wisdom in Pappaseng Bugis), *Sawerigading*, 16(2), 265-274

Desa Untuk Mencegah Kecurangan”. Bertujuan untuk mengamati upaya aparat Desa Siawung dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka sesuai dengan peraturan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan keuangan dengan prinsip *Good Corporate Governance*, serta mengintegrasikan nilai budaya “*Mapaccing, Malempu na Magetteng*” untuk mencegah dan mengurangi kecurangan. Hasilnya aparat desa menjadi karakter yang lebih bersih, jujur, dan konsisten.⁷ Perbedaan penelitian yang dilakukan Dian Alifka.R dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Dian Alifka.R lebih menekankan pada pemahaman Falsafah Budaya Bugis dalam pengelolaan dana desa secara menyeluruh, sedangkan peneliti lebih fokus pada penerapan kode etik pelaporan keuangan terkait dengan Kearifan Lokal Budaya Bugis *Malempu’ na Mapaccing*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syafridayani dengan judul “Kajian Falsafah Budaya Bugis *Malempu Na Mapaccing* Dalam Mengelola Keuangan Desa Untuk Menekan Praktik Kecurangan (Fraud)”. Ditemukan bahwa aparat desa Pattiro Bajo menganggap falsafah *Malempu’ na Mapaccing* sebagai nilai budaya yang sangat cocok untuk diterapkan di instansi pemerintahan. Nilai budaya ini, yang dipahami dan diterapka oleh mereka dapat mengendalikan tindakan individu dalam pengelolaan keuangan desa. Ini menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat di pertanggungjawabkan kepada pemerintah dan Allah SWT.⁸ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh

⁷ Dian Alifka.R”, Analisis Falsafah Budaya Bugis “*Mapaccing, Malempu Na Magetteng*” Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Kecurangan Vol 6, No.004(2020) Fakultas Ekonomika Progam Studi Akuntansi.

⁸ Syafridayani “Kajian Falsafah Budaya Bugis *Malempu Na Mapaccing* Dalam Mengelola Keuangan Desa Untuk Menekan Praktik Kecurangan (Fraud), 2018 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

Syafridayani dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bahwa penelitian Syafridayani berfokus pada penerapan falsafah budaya bugis *Malempu' na Mapaccing* dalam mengelola keuangan desa untuk mengurangi praktik kecurangan. Sementara peneliti lebih terfokus pada kearifan lokal budaya bugis *Malempu' na Mapaccing* dalam penerapan kode etik pelaporan keuangan di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang.

4. Penelitian oleh Ahmad Yamin berjudul “Penggunaan Dana Desa yang Partisipatif berbasis Kearifan Lokal”. Dengan tujuan mencegah penyimpangan politik dalam pengelolaan dana desa. Salah satu pendekatan yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi penyimpangan ini adalah menerapkan nilai-nilai budaya sebagai bentuk kearifan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan dalam mengelola dana desa dengan harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan evaluasi penggunaan dana desa berada dibawah tanggung jawab pemerintah desa.⁹ Perbedaan penelitian Ahmad Yamin dengan peneliti terletak pada topik dan fokus penelitian. Penelitian Ahmad Yamin lebih memusatkan pada persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya desa secara partisipatif berbasis kearifan lokal, sementara peneliti lebih fokus pada penerapan kode etik pelaporan keuangan berbasis kearifan lokal di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang, dengan penekanan pada kearifan lokal yang disebut *Malempu' na Mapaccing*.
5. Penelitian yang di lakukan oleh Siradjuddin, Syaharuddin dengan judul “Internalisasi nilai-nilai *Macca Na Malempu'* Dalam Etika Bisnis Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pelanggan CV. Idlan Waranie Perkasa

⁹ Ahmad Yamin, “Penggunaan Dana Desa Yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, No.2 (2021)

(MABELLO INDONESIA)”. Bertujuan untuk menjelaskan bagaimana nilai *Macca na Malempu’* dan etika bisnis islam di implementasikan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan di Mabello Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mbello Indonesia menerapkan nilai-nilai *Macca na Malempu’* seperti inovasi produk dan kontrol kualitas produk, serta etika bisnis islam dengan mematuhi 5 aksioma dasar. Penelitian ini berfokus pada upaya internalisasi nilai-nilai tersebut untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.¹⁰ Perbedaan penelitian yang di lakukan oleh Siradjuddin, Syaharuddin dengan penelitian yang di lakukan oleh peneliti adalah bahwa penelitian Siradjuddin dan Syaharuddin fokus secara khusus pada implementasi *Maccana Malempu’* dan etika bisnis islam dalam konteks Mabello Indonesia, sementara peneliti lain memusatkan perhatian pada kearifan lokal *Malempu na* Mapaccing dalam penerapan kode etik pelaporan keuangan di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang.

¹⁰ Sa’adal Jannah, “Internalisasi Nilai-Nilai Macca’ Na Malempu’ Dalam Etika Bisnis Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pelanggan CV. Idlan Waranie Perkasa (Mabello Indonesia)”, *Jurnal Ekonomi , Keuangan dan Perbankan Syariah, No.2* (2020).

B. Tinjauan Teori

1. Teori Fenomenologi

Secara esensial, Fenomenologi adalah pendekatan yang memeriksa dan memahami berbagai bentuk pengalaman yang muncul di dunia, terutama dalam konteks kesadaran. Uniknya, fenomena ini hadir dalam setiap kesadaran manusia, melibatkan konsep “hadir dan menghadirkan”. Manusia, sebagai makhluk yang aktif berkomunikasi, berinteraksi, dan memiliki tujuan yang dituju, memiliki karakteristik istimewa dalam intensionalitas psikis yang mereka sadari, yang terhubung dengan pengertian makna dan penalaran. Dunia makna manusia ini dapat dijelajahi melalui pendekatan fenomenologi.¹¹ “*phainomenon*” yang berasal dari bahasa Yunani memiliki makna “apa yang terlihat.” Dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diartikan sebagai “fenomena” yang merujuk pada suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diamati atau dirasakan, ini dapat dijelaskan sebagai gejala alam dan peristiwa yang dapat dirasakan serta dilihat melalui panca indera. Ini mengindikasikan bahwa fenomena adalah sesuatu yang dapat diamati dan diberikan makna dalam konteks kehidupan manusia.

Fenomenologi pada awalnya adalah kajian dalam bidang filsafat dan sosiologi. Edmund Husserl, tokoh utamanya, bertujuan agar fenomenologi dapat memberikan pemahaman yang lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia, terutama saat ilmu pengetahuan mengalami krisis dan perubahan suasana¹². Metode ini berkembang diberbagai ilmu sosial, termasuk dalam bidang komunikasi, sebagai cara terapan untuk penelitian, khususnya dalam pendekatan kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Secara sederhana, praktik fenomenologi ini bisa dilakukan

¹¹ Rorong, Michael Jibrael, “Fenomenologi”, *Deepublish* (2020).

¹² O. Hasbiansyah, “Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Ilmu Parakti Penelitian Dalam Ilmu Social Dan Komunikasi”, *Jurnal MediaTor*, No.1(2008)

dalam kehidupan sehari-hari dengan mengamati fenomena, membuka diri, membiarkan fenomena itu muncul, dan memahaminya dari perspektif fenomena itu sendiri.

J.H. Lambert memperkenalkan istilah “Fenomenologi” pada tahun 1765 untuk merujuk pada teori kebenaran. Namun, makna istilah ini berkembang seiring waktu. Menurut Kockkelmans, pada periode yang sama, fenomenologi digunakan dalam filsafat dan dapat ditemui dalam karya Immanuel Kant, sebelum didefinisikan dan dikembangkan secara teknis oleh Hegel. Bagi Hegel, fenomenologi mengacu pada pengetahuan yang muncul dalam kesadaran manusia, menggambarkan apa yang dipahami dan dialami dalam kesadaran.

Edmund Husserl memelopori fenomenologi sebagai disiplin filosofis pertama yang menempatkan dia sebagai tokoh utama dalam pengembangan konsep ini. Filosofi Husserl menjadi sangat terkenal pada tahun 1950-an, dimana tuannya utamanya adalah menciptakan landasan yang kuat bagi filsafat, memungkinkannya menjadi ilmu yang independen dan murni. Fenomenologi pada awalnya merupakan gabungan dari studi filosofis, sosiologis, dan juga pendekatan terhadap seni.

Husserl mengkritik bahwa dengan munculnya fenomenologi, terjadi krisis ilmiah dimana sains kehilangan kemampuannya untuk memberikan kontribusi signifikan pada kehidupan manusia sehari-hari. Dia meyakini bahwa sains modern telah lupa akan konsep teori sejati, yang seharusnya menjadi inti dari ilmu pengetahuan, karena fokus terlalu pada kemajuan disiplin ilmu tanpa memperhatikan makna sejati dari pengetahuan itu sendiri. Dalam hal ini, Husserl mengkritik sains sebagai berikut:

- a. Dalam pandangan objektivisme dalam ilmu pengetahuan, dunia dianggap sebagai susunan fakta objektif yang saling terkait. Menurut Husserl, pengetahuan semacam itu berasal dari pengalaman sehari-hari yang ia sebut sebagai “lebenswelt”

- b. Interpretasi objektivistis menyatakan bahwa kesadaran manusia tidak dapat dipisahkan dari subjek, karena ilmu pengetahuan tidak dapat terlepas dari keterkaitannya dengan kepentingan dunia sehari-hari.
- c. Teori yang timbul dari usaha untuk mengurangi kepentingan adalah pandangan yang diakui dalam pemikiran Barat.

Menurut Husserl, krisis dalam ilmu disebabkan oleh kesalahpahaman terhadap makna sejati dari bidang ilmiah. Melalui fenomenologi, dia berupaya menjalin hubungan antara teori dan pengalaman hidup untuk menciptakan teori murni yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fenomenologi Husserl berbeda dari filsafat ilmu, menekankan pendekatan unik untuk memahami fenomena dengan mendekatinya dari perspektif yang berbeda.

Fenomenologi adalah upaya untuk menyimpang dari metode ilmiah, yang menganggap bahwa keberadaan realitas tidak diketahui oleh orang awam. Fenomenologi menjadikan pengalaman hidup sebagai pengetahuan dasar tentang realitas.

Kata What dan Berg, *Phenomenologist, . . . , are not at all in the business of trying to explain why people do what they do. Rather, they are interested in explaining how people do what they do; according to constructs they manage to organize their daily lives, especially their communications between each other.* Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian fenomenologis tidak tertarik untuk menyelidiki aspek kausal dari suatu peristiwa, melainkan bertujuan untuk menyelidiki bagaimana orang mengalami pengalaman dan apa arti pengalaman itu bagi mereka.

Fenomenologi adalah pendekatan yang memerhatikan sifat-sifat internal fenomena ketika mereka muncul dalam kesadaran. Metodenya deskriptif, bertujuan mengungkap tujuan, kesadaran, dan realitas kehidupan. Fenomenologi dianggap bagi studi filsafat dan ilmu positif, dengan bahasa sebagai alat utamanya.

Brouwer memandang fenomenologi sebagai cara unik bagi ahli fenomenologi untuk menyampaikan pengalaman mereka kepada orang lain.

Sementara ilmuwan positif menggunakan bukti, ahli fenomenologi lebih fokus pada penggambaran fenomena dengan bahasa, menyajikan apa yang dialami sebagai cara memahami pengalaman kepada individu lain. Ahli fenomenologi memusatkan perhatian pada fenomena daripada hanya benda yang terlihat, membutuhkan wawancara dan penggabungan hasil dengan prinsip-prinsip filosofis fenomenologi untuk memahami hakikat makna dari fenomena tersebut.

Pendekatan fenomenologi adalah metode penelitian kualitatif yang berakar dalam filsafat dan psikologi. Istilah “fenomenologi” berasal dari bahasa Yunani “*phainomenon*”, yang terdiri dari “*phainomai*” yang berarti menampakan diri, dan “*logos*” yang berarti akal budi. Ini mengacu pada ilmu yang mengungkapkan pengalaman individu kedalam bentuk yang lebih jelas, mencoba memahami struktur dan makna yang tersembunyi dalam pengalaman manusia. Pendekatan fenomenologi menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk mendalami konteks sosial, budaya, politik, atau sejarah dimana pengalaman tersebut terjadi.

Pendekatan fenomenologi merupakan pilihan yang tepat dalam penelitian ini karena melibatkan unsur sosial, budaya dan sejarah. Penelitian ini difokuskan pada akuntansi aset bersejarah, sehingga ketika aspek ini tidak dapat dipisahkan. Dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan untuk secara lebih mendalam menjelaskan fenomena yang terjadi pada objek penelitian, berdasarkan pengalaman hidup individu yang terkait dengan objek tersebut, seperti pengelola aset bersejarah. Untuk perbandingan, akademisi dapat berperan sebagai informan, berbagai pengalaman mereka dalam mengajar konsep aset. Konsep fenomenologi, seperti yang diungkapkan oleh Lester, menekankan pada pengidentifikasian fenomena melalui pengalaman yang dirasakan oleh individu dalam situasi tertentu, berdasarkan paradigma pengetahuan dan sudut pandang subjektif masing-masing. Pendekatan fenomenologi mengasumsikan bahwa peneliti tidak memiliki pengetahuan yang tetap tentang objek penelitian mereka, dan mereka berusaha memahami dunia konseptual subjek penelitian untuk menggali pemahaman tentang apa dan bagaimana pengertian itu terbentuk dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami, memahami isu-isu sentral yang terkait dengan struktur utama objek penelitian tersebut.

Fenomenologi memiliki metode atau langkah-langkah untuk memahami fenomena. Pertama, melihat fenomena sebagai esensi, sebagai fenomena murni. Fenomenologi melakukan reduksi. Ini semacam abstraksi, untuk melihat sesuatu dan menutup mata terhadap sesuatu yang lain. Reduksi pertama adalah melihat fenomena sebagai sesuatu yang terlihat dan tidak melihatnya sebagai sesuatu yang ada. Kesimpulan lainnya adalah kita melihatnya sebagai hal yang normal. Kami melihat esensinya. Kita tidak melihat orang mengajar di ruang kelas misalnya, tapi kita melihatnya sebagai dunia pendidikan. Ketiga adalah kita mengalihkan pandangan kita ke masalah budaya. Reduksi tertinggi, reduksi transendental, terdiri dari melihat fenomena sebagai objek super-individual dari subjek universal.

Pendekatan fenomenologis cocok untuk penelitian ini karena berkaitan dengan unsur-unsur sosial, budaya dan sejarah. Akuntansi aset sejarah merupakan inti dari penelitian ini, sehingga ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan fenomenologi agar lebih tepat menjelaskan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan pengalaman hidup para pihak di lokasi penelitian, misalnya pengelola benda-benda bersejarah. Sebagai perbandingan, dapat dikatakan bahwa ilmuwan dapat digunakan sebagai informan yang mempresentasikan pengalaman hidupnya ketika mengajarkan konsep kepemilikan. Lester mengatakan bahwa fenomenologi pada hakekatnya adalah identifikasi fenomena berdasarkan apa yang dirasakan seseorang dalam situasi tertentu dan berdasarkan paradigma pengetahuan dan subjektivitasnya sendiri. Fenomenologi berasumsi bahwa peneliti tidak mengetahui apa yang mereka

pelajari. Peneliti mencoba memasuki dunia konseptual siswanya agar mereka mengerti apa dan bagaimana pengertian itu, kemudian mereka mengembangkan pengertian itu seputar kejadian sehari-hari. Peneliti mendalami secara mendalam pertanyaan sentral tentang struktur dasar objek penelitian.

Penelitian kualitatif, penting bagi peneliti untuk mengadopsi “*perspektif emic*”. Hal ini berarti bahwa data yang diperoleh tidak seharusnya mencerminkan pandangan atau pemikiran peneliti, melainkan harus mencerminkan realitas yang terjadi dilapangan. Peneliti harus fokus pada pengalaman, persepsi dan pemikiran partisipan atau sumber data tanpa berdasarkan pada asumsi atau hipotesis sebelumnya.¹³ Dalam konteks fenomenologi, tujuan utamanya adalah untuk mendeskripsikan fenomena daripada menjelaskannya, dan pendekatan ini dimulai dari sudut pandang yang bebas dari hipotesis atau dugaan sebelumnya.

2. Teori Behaviour

Teori Behavior adalah pandangan yang menganggap bahwa perilaku seseorang tidak hanya tergantung pada kontrol individu, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti ketersediaan sumber daya, kesempatan, dan keterampilan.¹⁴ *Theory of planned behavior* disisi lain, berfokus pada gagasan bahwa perilaku dipengaruhi oleh keyakinan dan informasi yang memengaruhi keputusan individu. Teori ini mendasarkan diri pada pandangan bahwa manusia cenderung melakukan tindakan setelah mempertimbangkan

¹³ Angraeni, fauziah, “Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur)”, Semarang : *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis* (2014).

¹⁴ Adrie Putra, Sri Handayani, Ari Pambudi, “Perilaku Pengendalian Diri Pada Perilaku Manajemen Keuangan Personal Berdasarkan Pada Teori Planned Behavior Menggunakan Pendekatan Partial Least Square”, *Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul*. (2013).

konsekuensi dari tindakan tersebut, dengan berlandaskan akal sehat dan informasi yang tersedia.

Salah satu teori yang sangat populer dalam menjelaskan perilaku manusia adalah Teori Perilaku Terencana (TPB). Teori ini menekankan bahwa niat untuk bertindak menjadi faktor kunci yang mendorong perilaku individu¹⁵. TPB menjelaskan bahwa terdapat tiga komponen yang memengaruhi niat, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku: sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Niat disini berperan sebagai penghubung antara ketiga komponen tersebut dengan perilaku individu.

Menurut *theory of planned behavior*, niat merupakan hasil dari tiga faktor utama, yaitu faktor pribadi, faktor sosial, dan faktor kontrol. Faktor pribadi melibatkan sikap, Faktor sosial mencakup norma subjektif, dan faktor kontrol melibatkan *perceived behaviour control* (PBC).

Seseorang mungkin memiliki beragam keyakinan tentang suatu perilaku, tetapi ketika dihadapkan pada situasi tertentu, hanya sebagian kecil dari keyakinan tersebut yang benar-benar memengaruhi tindakan mereka. Itulah sedikit keyakinan yang dominan dalam memengaruhi perilaku individu.

Teori ini menghubungkan kearifan lokal dan kode etik dengan mengaitkan kearifan lokal, yang mencakup nilai-nilai hidup masyarakat, dengan karakter individu yang berkembang seiring waktu. Teori ini juga membahas bagaimana karakter seseorang dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor. Pendekatan Behaviour, dalam konteks ini menganggap bahwa lingkungan sosial dan budaya

¹⁵ I Nyoman Putra Yasa, I Putu Hendra Martadinata, I Gede Putu Banu Astawa, "Peran Theory Of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen", 149.32 (2017), 149-67 <<https://doi.org/10.24034/j25485024>, y2019.v3.i2.4082>

memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku manusia secara spesifik. Kode etik, disisi lain merujuk pada perilaku yang mencerminkan kebaikan dan kepatuhan terhadap norma sosial, dan teori ini menjelaskan bagaimana faktor-faktor tertentu dapat memengaruhi perubahan dalam kode etik atau perilaku seseorang.

Sikap terhadap perilaku (*attitude to behavior*) adalah penilaian seseorang terhadap perilaku berdasarkan pertimbangan dampak positif dan negatif dari perilaku yang dilakukan. Niat terjadi ketika seseorang merasa bahwa perilaku yang akan dilakukan akan bermanfaat atau bermanfaat baginya. Menurut pandangan ini, individu semakin termotivasi untuk memenuhi niat mereka melalui perilaku nyata.

Teori ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat, antara lain untuk meramalkan serta memahami dampak-dampak motivasi pada perilaku yang tidak terkendali atau tidak didasarkan pada keinginan individu. Selain itu, teori ini digunakan untuk mengidentifikasi cara dan tujuan dalam mengarahkan strategi perubahan perilaku. Selain itu, teori ini menjelaskan aspek-aspek penting dari berbagai perilaku manusia, seperti alasan seseorang memilih untuk melakukan korupsi, memilih calon dalam pemilu, alasan ketidak masukannya dalam pekerjaan, dan mengapa seseorang terlibat dalam hubungan pranikah.

Faktor kontrol terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterampilan, kemampuan, pengetahuan, emosi, stres, dll. Faktor eksternal adalah faktor situasional dan lingkungan.

Teori ini mempertimbangkan bahwa semua tindakan tidak selalu terkendali, sepenuhnya, dan bahwa perilaku bisa berada pada berbagai tingkat kendali, mulai dari sepenuhnya tidak terkendali. Seseorang mungkin memiliki kendali penuh atas

perilakunya ketika tidak ada hambatan yang menghalangi eksekusi perilaku tersebut. Disisi lain, dalam situasi ekstrem, mungkin tidak ada kemungkinan untuk mengendalikan perilaku karena kurangnya peluang, sumber daya, atau keterampilan yang diperlukan. Faktor-faktor pengendali ini dapat dikelompokkan menjadi faktor internal, seperti keterampilan, kemampuan, pengetahuan, emosi, dan stres serta faktor eksternal yang mencakup situasi dan faktor-faktor lingkungan.

C. Kerangka Konseptual

1. Kearifan Lokal

Kearifan lokal dapat dijelaskan sebagai ciri khas budaya suatu bangsa yang memungkinkannya untuk menggabungkan dan mengembangkan unsur-unsur budaya dari luar menjadi bagian integral dari identitas dan kemampuannya. I Ketut Gobyah berpendapat bahwa kearifan lokal adalah kebenaran yang telah menjadi bagian tradisi dalam suatu wilayah tertentu, termasuk nilai-nilai kehidupan yang diwariskan melalui generasi, baik dalam aspek keagamaan, budaya maupun adat istiadat, seringkali disampaikan secara lisan dalam kerangka sosial masyarakat. Menurut Sartini, kearifan lokal melibatkan nilai-nilai, norma, etika, keyakinan, adat istiadat dan peraturan khusus.

Kearifan lokal adalah cara komunitas mengartikan dunianya. Istilah “Kearifan Lokal” dalam bahasa asing sering disebut sebagai “ *Local Knowledge*” atau “*Local Genius*,” yang mengacu pada perbedaan pandangan, pengetahuan dan strategi hidup dalam menjawab kebutuhan masyarakat setempat.¹⁶

¹⁶ Nendah Kurniasari dan Elly Reswat, “ Kearifan Lokal Lamalera: Sebuah Ekspresi Hubungan Manusia Dengan Laut”, Buletin Riset Sosek Kelautan Dan Perikanan, No.2 (2011)

Kearifan lokal yang ada diberbagai daerah di Nusantara merupakan bagian berharga dari warisan budaya yang perlu dihargai dan dijadikan bagian dari identitas bangsa.

Kearifan local adalah interpretasi komunitas terhadap lingkungan mereka. Istilah “Kebijaksanaan Setempat” sering digunakan untuk merujuk pada pandangan hidup, pengetahuan, dan strategi kehidupan yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk mengatasi berbagai masalah dan memenuhi kebutuhan mereka.¹⁷ Kearifan lokal di berbagai wilayah di Indonesia adalah kekayaan budaya yang sebaiknya dihargai dan dijaga sebagai bagian integral dari identitas bangsa.

Kearifan lokal dipelajari oleh Baura, Jantje dan Tulusan, Wilar, Posumah dan Sondakh, yang mengatakan bahwa nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial jangka panjang diperlukan untuk mendorong dan membangkitkan keterampilan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat, melestarikan warisan leluhur kita. Selain itu, Utami dan Hapsari melakukan penelitian terkait kearifan lokal yang mengungkapkan bahwa masyarakat mengetahui cara bersiul berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, karena masyarakat sadar akan tanggung jawabnya dalam pembangunan desa, dan seseorang mulai bersiul. karena aparat desa. Kepatuhan pada suasana etis, intensitas moral, dan kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan interaksi antara suatu komunitas dengan lingkungannya sebagai strategi untuk mengatasi permasalahan kehidupan masyarakat. Darmada, Atmadja dan Sinarwati menyelidiki pengetahuan lokal tentang proses dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tanggung jawab tidak lepas dari kearifan lokal budaya lokal, karena nilai kearifan lokal dapat berpengaruh

¹⁷ Nendah Kurniasari dan Elly Reswat, “Kearifan Lokal Masyarakat Lamalera: Sebuah Ekspresi Hubungan Manusia Dengan Laut”, Buletin Riset Sosek Kelautan dan Perikanan, No.2 (2011).

positif terhadap tanggung jawab keuangan. Hasil penelitian Nurinten, Mulyan, Alhamuddin dan Permatasar menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang ditanamkan setelah pendidikan anak usia dini penting sebagai sarana pencegahan korupsi yaitu pembentukan karakter antikorupsi melalui kearifan lokal Sunda salah satunya adalah cerita Jeung Launing Keur Leungan Menurut penelitian Novitasar, penerapan tradisi Banjar khususnya untuk begawe meiraq dapat menjadi upaya masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi antara lain disiplin jujur, kerja keras, keberanian, tanggung jawab, kesederhanaan, keadilan, kemandirian dan kepedulian.

Kearifan lokal adalah kebijakan yang mengedepankan keunggulan budaya dan karakteristik geografis masyarakat setempat, dengan fokus pada kepentingan tempat dan lokasi. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dan pemerintahan, kearifan lokal adalah nilai-nilai yang mengatur tata kehidupan masyarakat dengan tujuan melindungi dan merawat lingkungan hidup secara berkelanjutan. Meskipun tidak secara rinci dibahas dalam UUD NKRI 1945, konsep ini menjadi filter dan kendali terhadap pengaruh budaya luar yang diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 No. 30.¹⁸

Ungkapan pepatah Bugis yaitu:

“Duami kuala sappo, Unganna panasae na belona kanukue (Duami riyala sappo lempu’e sibawa paccinge)

Artinya: Hanya dua hal yang saya jadikan sebagai simbol, yaitu bunga angka yang mencerminkan kejujuran dan penghias kuku yang melambangkan

¹⁸ R.Njatrijani, “Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang”, *Gema Keadilan*, vol.5, no.1

kesucian atau kebersihan. Dalam bahasa bugis, bunga nangka disebut “*Lempu*,” sementara tanaman pacar kuku yang dikenal oleh banyak orang bugis adalah yang mereka sebut “*Pacci*” yang juga terkait dengan kata “*Paccing*” yang berarti bersih atau suci.¹⁹

Indikator dari sikap *Malempu*’ (Kejujuran) antara lain:

1. Menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jujur adalah ketika anda mengungkapkan sesuatu sesuai dengan realitas yang sebenarnya, baik melalui kata-kata, tulisan, isyarat, maupun tindakan. Namun dalam membentuk kepribadian yang jujur, seseorang kemudian harus diajarkan mulai dari anak-anak hingga kemudian menjadi suatu kebiasaan.
2. Tidak Berbohong. Berbicara jujur adalah sikap yang menghindari penggunaan informasi yang menyesatkan, perilaku, atau citra diri yang sengaja dimanipulasi untuk membuat orang lain mendapatkan pemahaman atau keyakinan yang salah. Oleh karena itu, penting untuk menghindari berbohong, karena tindakan berbohong dapat membawa konsekuensi buruk, baik didunia maupun di akhirat.
3. Berani Mengakui Kesalahan. Tindakan matang dalam menyelesaikan permasalahan, yang akan mendapatkan penghormatan dan pemahaman lebih dari orang lain terhadap dirimu. Adapun

Indikator dari sikap *Mapaccing* (suci/bersih) antara lain:

1. Transparansi. Dalam kontek laporan keuangan berarti menjelaskan dengan jelas dan memberikan data yang mencukupi sehingga pemakai laporan keuangan

¹⁹ Syafridayani, “Kajian Falsafah Budaya Bugis Malempu Na Mapaccing Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Menekan Praktik Kecurangan (Fraud)”,(*Skripsi Jurusan Akuntansi Syariah UIN Alauddin Makassar,2018*). Hal.28

dapat memahami dengan baik situasi keuangan, kinerja, dan aliran kas perusahaan. Ini melibatkan penyajian laporan keuangan yang bebas dari ketidakberesan atau kecurangan.

2. Independensi. Laporan keuangan harus di susun secara independen dan objektif, tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain.

Pertahanan diri setiap individu sejatinya memadai apabila ia dapat mempertahankan integritasnya dengan menjaga perilaku yang jujur serta menghindari tindakan yang mencemarkan atau melanggar prinsip moral. Dalam bahasa bugis, bunga nangka disebut “*Lempu*,” yang mencerminkan konsep kejujuran, sementara hiasan kuku dikenal sebagai “*Pacci*,” yang jika ditulis dalam aksara lontara dapat diartikan sebagai “*Paccing*,” yang merujuk pada kebersihan dan kesucian.

Seorang pemimpin perlu menjunjung tinggi prinsip *Malempu’ na Mappaccing*, yang berarti integritas dan kejujuran. Kepemimpinan yang tidak bersih dari perbuatan tercela akan menciptakan kesan negatif pada lingkungan sekitarnya, sesuai dengan tujuan mereka, dan pemimpin yang tidak jujur akan merugikan rakyatnya. Oleh karena itu, Allah SWT mengutus Rasulullah SAW sebagai contoh pemimpin yang dapat diikuti, sebagaimana firman Allah SWT:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ

كَثِيرًا

Terjemahanya:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”(QS.Al-Ahzab : 21).

Kearifan lokal merupakan fondasi yang tumbuh dalam konteks sosial suatu komunitas dan menjadi dasar nilai serta sasaran yang ingin dicapai oleh mereka. Sebagai contoh, dalam budaya bugis, kearifan lokal seperti konsep *Malempu' na Mapaccing* digunakan untuk mempertahankan harmoni dalam masyarakat dan sebagai arah yang di inginkan oleh komunitas.²⁰ Nilai *Malempu' na Mapaccing* bagi masyarakat bugis bisa dianggap sebagai kesadaran dan pemahaman yang mendalam.

Artinya, pemahaman yang dimiliki individu terhadap lingkungan sangat berkaitan dengan perkembangan pemahaman mereka tentang lingkungan. Dengan kata lain, sejauh mana kearifan lokal dapat bertahan sangat tergantung pada sejauh mana mereka dapat mempertahankan persepsi atau pandangan mereka terhadap lingkungan yang ada saat ini, di tengah pengaruh modernisasi dan globalisasi yang seringkali tidak mendukung lingkungan. Diskusi tentang kearifan lingkungan memberikan pelajaran tentang bagaimana kita seharusnya merawat lingkungan dan menghadapi tantangan yang mengancam keberlanjutan alam.

2. Kode Etik Akuntansi

Di era globalisasi saat ini, pesaing semakin intens, dan hanya mereka yang bersiap dan memiliki pengetahuan serta sikap profesional yang mumpuni yang dapat berkembang dan bertahan. Setiap profesi harus menjalankan tugasnya dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Keahlian dan kompetensi khusus yang dimiliki oleh setiap profesi menjadi hal yang mutlak untuk bersaing didunia bisnis saat ini. Namun selain aspek kemampuan khusus, etika juga merupakan unsur penting yang harus dipegang teguh oleh para praktisi dalam menjalankan profesi mereka.

²⁰ Zamrodah, Yuhani, "Fenomenologi", Jakarta, No. 2 (2016).

Masalah etika merupakan dasar penting bagi setiap pelaku bisnis, mencakup standar moral yang mengenai benar salah dan baik buruk. Etika, menurut perspektif Kant, mendorong kesadaran manusia untuk bertindak otonom dan bukan heteronom. Prinsip otonomi moral, yang mencakup kebebasan dan tanggung jawab, menjadi esensial dalam etika bisnis. Dalam konteks ajaran Islam, etika membimbing berbagai aspek perilaku, termasuk dalam menjalankan bisnis. Sebuah bisnis yang sehat dalam pandangan Islam dibangun atas fondasi etika yang kuat, memastikan keberlanjutan aktivitas bisnis yang nyaman dan mendatangkan berkah.²¹

Pentingnya penerapan etika dalam berbagai profesi telah menjadi topik utama dalam perbincangan masyarakat saat ini. Adanya kasus pelanggaran etika dalam berbagai bidang di Indonesia telah memicu kesadaran masyarakat untuk lebih menghargai perilaku yang sesuai dengan norma-norma moral. Etika kini dianggap sebagai aspek yang sangat penting dalam menjalankan suatu profesi, guna menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Setiap jenis pekerjaan atau profesi memiliki tanggung jawab untuk bertindak secara etis, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

Etika profesional dalam praktik akuntan di Indonesia dijelaskan dalam kode etik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI adalah satu-satunya organisasi profesi akuntan di Indonesia yang melibatkan berbagai jenis akuntan, termasuk auditor pemerintah, auditor intern, auditor independen, akuntan

²¹ Abdul Hamid and Muhammad Kamal Zubair, "Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah," *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2019): 16-34, <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1037>.

manajemen, akuntan pendidik, dan akuntan diluar profesi audit, manajemen, dan pendidikan.²²

Pemantauan adalah suatu keharusan dalam menghadapi masalah penipuan laporan keuangan. Kualitas pelatihan yang baik memerlukan keberadaan pengendalian internal yang efisien. Pengendalian internal yang efektif memungkinkan manajemen untuk menghadapi dengan baik perubahan ekonomi yang cepat, persaingan ketat, fluktuasi permintaan pelanggan, dan restrukturisasi demi perkembangan di masa depan. Ketika pengendalian internal perusahaan kurang kuat, risiko kesalahan dan kecurangan meningkat. Sebaliknya, jika pengendalian internal pengendalian kuat, peluang terjadinya kecurangan bisa diminimalkan. Efektivitas pengendalian internal memiliki dampak yang signifikan dalam melawan kecurangan akuntansi, karena adanya pengendalian internal, tugas-tugas secara otomatis akan mendapat pengawasan dari pihak lain. Terdapat 5 elemen utama dalam pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, evaluasi risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi informasi dan pengawasan. Elemen-elemen ini membantu perusahaan mencapai tujuannya.

Penerapan prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) :

- a. Tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas ini sangat penting. Anggota berperan kunci dalam masyarakat sebagai akuntan profesional. Dalam perannya ini, mereka memiliki kewajiban kepada semua pihak yang menggunakan layanan profesional mereka. Selain itu, anggota juga memiliki kewajiban untuk selalu bekerja sama dengan sesama anggota guna mengembangkan bidang profesi akuntansi, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memenuhi tugas profesional

²² Andi Besse Nurlan, "Persepsi Akuntan Dan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia," (*Skripsi sarjana : fakultas ekonomi 2011*) h.14

mereka dalam mengatur diri sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dari seluruh anggota untuk mempertahankan dan memperkuat tradisi profesi ini.

- b. Kepentingan umum. Setiap anggota harus selalu bertindak dengan pelayanan kepada warga negara, menghormati kepercayaan masyarakat, serta terlibat secara profesional.
- c. Integritas. Integritas adalah aspek karakter yang menjadi landasan dalam mengakui suatu profesi. Hal ini menjadi dasar kepercayaan masyarakat dan tolak ukur bagi anggota profesi dalam mengevaluasi segala keputusan yang diambil. Integritas menekankan pada nilai-nilai seperti kejujuran dan transparansi anggota, tanpa mengabaikan pentingnya menjaga kerahasiaan pihak yang menerima layanan.
- d. Objektivitas adalah sifat yang meningkatkan nilai layanan yang diberikan oleh individu. Prinsip objektivitas mengharuskan individu untuk bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak terpengaruh oleh pihak lain.
- e. Tugas kehati-hatian adalah kewajiban bagi suatu profesi, yang mengimplikasikan bahwa anggota harus menjalankan tugas resmi mereka secara cermat dan profesional, dengan berfokus pada kepentingan terbaik pengguna layanan, dan menjalankan tugas profesional mereka kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.
- f. Kerahasiaan. Rahasia informasi harus dijaga dengan penuh rasa hormat oleh setiap anggota saat mereka memberikan pelayanan profesional, dan mereka tidak boleh memanfaatkan atau mengungkap informasi tersebut tanpa izin, kecuali jika

ada alasan yang berhubungan dengan hak atau tugas profesional mereka atau persyaratan hukum yang mengharuskannya.

- g. **Konsistensi.** Konsistensi dalam akuntansi merujuk pada keterapian yang konsisten terhadap standar, yang hanya dapat berubah jika ada alasan yang sesuai.
- h. **Standar Teknis.** Setiap anggota harus menjalankan pekerjaan profesional mereka sesuai dengan norma-norma teknis dan profesional yang relevan. Anggota diwajibkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan penerimaan layanan sesuai dengan tingkat kompetensi mereka dan dengan itikad baik, apabila sesuai dengan prinsip-prinsip kejujuran dan objektivitas. Standar teknis dan ketentuan yang harus ditaati oleh anggota ini adalah yang diterbitkan oleh organisasi profesi akuntan, standar internasional akuntansi, serta berbagai peraturan hukum yang berlaku.²³

3. Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan (*Financial reporting*) merupakan beragam metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi finansial mereka. Menurut Standar Konsep Akuntansi Keuangan (SFAC) No.1 yang dikeluarkan oleh *Financial Accounting Standards Board* (FASB) pada tahun 1980, penting untuk dicatat bahwa tujuan pelaporan keuangan tidak hanya mencakup konten laporan keuangan (*Financial Statement*) itu sendiri.

Pelaporan Keuangan mencakup beberapa jenis laporan, termasuk laporan keuangan, laporan tahunan, laporan tata kelola perusahaan, laporan berkelanjutan ,

²³ “Kode Etik Yang Dimiliki Seorang Akuntan Publik Profesional,” accessed April 9, (2023)

laporan terintegrasi. SFAC No.1 menyebutkan beberapa tujuan dari pelaporan keuangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pelaporan Keuangan memberikan data yang bermanfaat bagi para investor, pemberi pinjaman, dan pihak lainnya dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan investasi, pemberian kredit, dan keputusan serupa secara objektif.
- 2.) Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan data yang dapat digunakan oleh investor, kreditor, serta pihak lain untuk mengevaluasi jumlah, pengakuan, dan ketidakpastian seputar penerimaan kas bersih yang terkait dengan entitas perusahaan.
- 3) Pelaporan keuangan adalah suatu proses yang mengungkapkan detail mengenai asal usul dana yang dimiliki perusahaan, klaim atas sumber-sumber tersebut, serta dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi tertentu yang memengaruhi dana dan hak klaim terhadap dana tersebut.
- 4) Pelaporan keuangan memberikan data mengenai kinerja finansial perusahaan selama suatu periode waktu.
- 5) Pelaporan keuangan adalah cara untuk mengungkapkan bagaimana perusahaan mendapatkan dan mengalokasikan dana, mengurus pinjaman, transaksi modal, seperti pembagian deviden tunai, dan bagaimana ini mempengaruhi sumber daya ekonomi perusahaan untuk pemiliknya. Selain itu, laporan keuangan juga mencerminkan faktor-faktor lain yang berdampak pada tingkat likuiditas dan solvabilitas perusahaan.
- 6) Pelaporan keuangan adalah sarana yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan bertanggungjawab kepada pemilik

(pemegang saham) mengenai cara penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dipercayakan kepada mereka.

- 7) Pelaporan keuangan memberikan data yang berguna untuk manajer dan direktur sesuai dengan kepentingan pemilik.

Salah satu usaha pemerintah untuk memajukan Indonesia adalah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri dalam berbagai aspek, termasuk perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan. Dibidang kehidupan manusia, pemerintah daerah memiliki peran penting, termasuk pengelolaan dana mereka sendiri. Transparansi adalah alat yang krusial dalam melindungi keuangan publik dari tindakan korupsi. Melalui transparansi, para pemegang kekuasaan diharapkan dapat menunjukkan keterbukaan, sejalan dengan ajaran Allah SWT dalam Surah An-Nahl ayat 101.

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

Terjemahnya :

“ dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui”. (QS.An-Nahl:101)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam “Modul CA Pelaporan Korporat” tahun 2021, disebutkan bahwa standar akuntansi terdiri dari dua komponen utama, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Di Indonesia, SAK mencakup tiga jenis utama, yaitu SAK Umum, SAK ETAP, dan SAK EMKM.

1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan kerangka kerja akuntansi yang digunakan untuk merancang dan mengungkapkan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010.
2. SAK Umum adalah pedoman akuntansi yang harus diikuti oleh organisasi yang memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan.
3. Pada bulan Mei 2009, IAI memperkenalkan SAK ETAP, yang kemudian mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2011. SAK ini hanya berlaku untuk entitas yang tidak memiliki kewajiban publik atau yang mendapat izin khusus dari regulator. Entitas yang terdaftar dipasar modal dan sektor keuangan, kecuali BPR yang diizinkan berdasarkan peraturan Bank Indonesia tidak dapat menggunakan SAK ETAP. SAK ETAP merujuk pada PSAK 45 yang sudah tidak berlaku dan telah digantikan oleh ISAK 35.
4. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, SAK EMKM adalah suatu standar akuntansi keuangan yang memiliki independensi dan digunakan oleh organisasi yang memenuhi syarat sebagai Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yang signifikan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), serta mencerminkan karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. SAK EMKM mengharuskan penyusunan tiga jenis laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.
5. SAK Syariah adalah panduan akuntansi yang berlaku untuk organisasi yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Namun penting untuk dicatat bahwa SAK Syariah bukan hanya relevan bagi entitas syariah, melainkan juga berlaku untuk semua jenis organisasi yang terlibat dalam transaksi yang mengikuti prinsip-prinsip

syariah. Khususnya, organisasi syariah diharapkan untuk menggabungkan SAK Umum, SAK ETAP, atau SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan mereka, serta menerapkan SAK Syariah khusus untuk transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Otonomi daerah mencerminkan pelaksanaan demokrasi dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan daerah serta usaha untuk meratakan kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi daerah. Kelurahan adalah unit pemerintahan terkecil yang diakui secara resmi dalam PP No. 73 Tahun 2005 tentang kelurahan. Peraturan Pemerintah ini menjelaskan kelurahan sebagai wilayah kerja Lurah yang merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Dengan konsep ini, kelurahan merupakan entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan melayani kebutuhan warga serta kepentingan lokalnya.²⁴

Merestrukturisasi dan meningkatkan alokasi dan APBN untuk kelurahan, perlu diperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, hal ini mencerminkan komitmen untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik dilingkungan perkotaan yang memiliki tantangan kompleks, termasuk masalah sampah, ketersediaan air bersih, sanitasi yang tidak memadai dan ketidaksempurnaan tata ruang permukiman. Selama ini pendanaan kelurahan sangat bergantung pada APBD yang dikelola oleh Kecamatan, dan lurah sebagai pemimpin kelurahan memiliki keterbatasan dalam penggunaan anggaran karena tidak memiliki otoritas penuh. Ini terutama berlaku untuk Kabupaten/Kota yang belum mengakui kelurahan sebagai organisasi perangkat daerah. Untuk mengatasi masalah ini, perlu

²⁴ Arya Surya Prawira, "Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Perspektif Hukum Positif Dan Siyasa Dusturiyah", *Skripsi, Hukum Tata Negara* (2022).

dipertimbangkan pembahasan serius tentang Dana Kelurahan. Untuk memajukan diskusi tentang Dana Kelurahan, tindakan perlu diambil.²⁵

D. Kerangka Berpikir.

Kerangka berpikir merupakan pondasi berpikir yang mencakup penggabungan teori, data, pengamatan, dan studi kepustakaan, yang menjadi dasar dalam menyusun sebuah karya tulis. Kerangka berpikir sering digunakan untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis, termasuk karya tulis kreatif dan penelitian. Kerangka berpikir dapat dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk diagram yang menghubungkan konsep-konsepnya, yang harus menjelaskan langkah-langkah dari awal hingga penelitian selesai.²⁶

Penelitian peneliti dimulai dengan menginvestigasi alur Kearifan Lokal *Malempu' na Mapaccing*. Kearifan lokal ini adalah manifestasi dari identitas budaya suatu bangsa dan kemampuan untuk mengolah unsur-unsur budaya dari luar menjadi bagian dari budaya mereka sendiri. Ini mencakup pandangan hidup, pengetahuan, dan strategi kehidupan yang diimplementasikan oleh masyarakat setempat dalam menangani permasalahan dan memenuhi kebutuhan mereka.

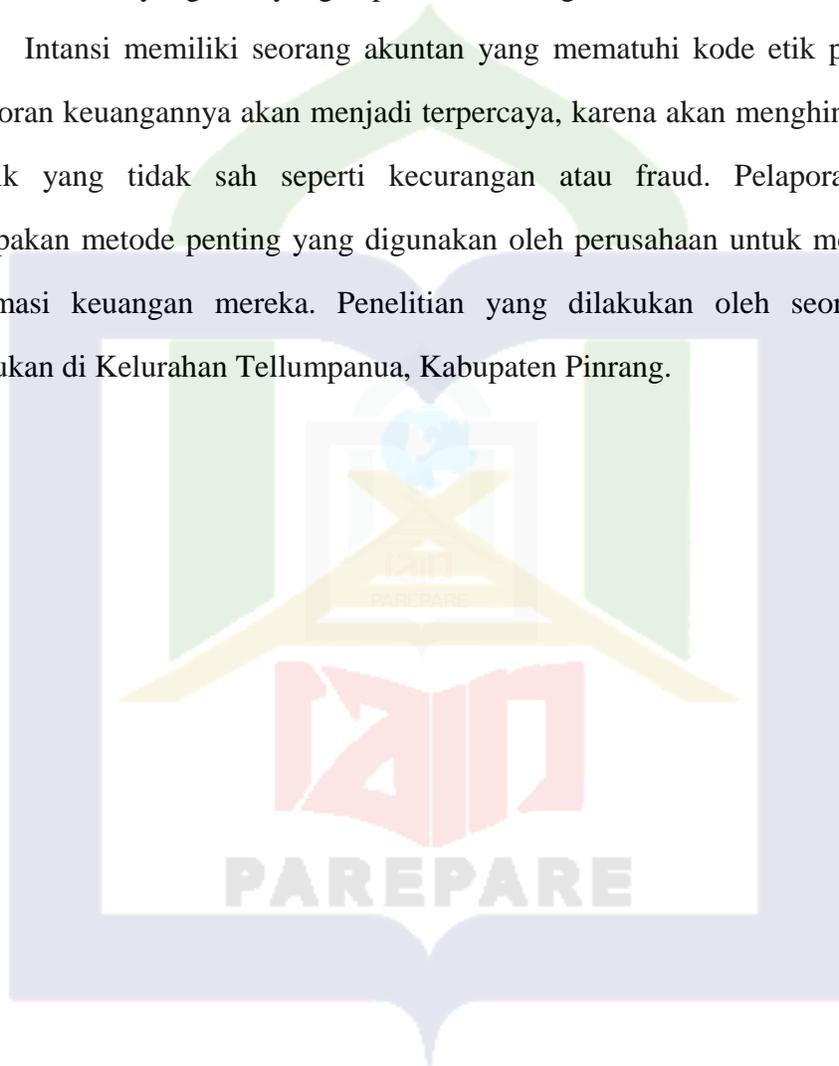
Salah satu unsur budaya bugis yang masih sangat kuat di banyak lapisan masyarakat bugis, terutama di Kelurahan Tellumpanua, adalah konsep *Malempu' na Mapaccing*. *Malempu'* merujuk pada kejujuran, yang mencakup berbicara sesuai dengan kenyataan, tidak berbohong, dan berani mengakui kesalahan. Sementara itu, *Mapaccing* mengacu pada kesucian dan kebersihan, yang melibatkan transparansi

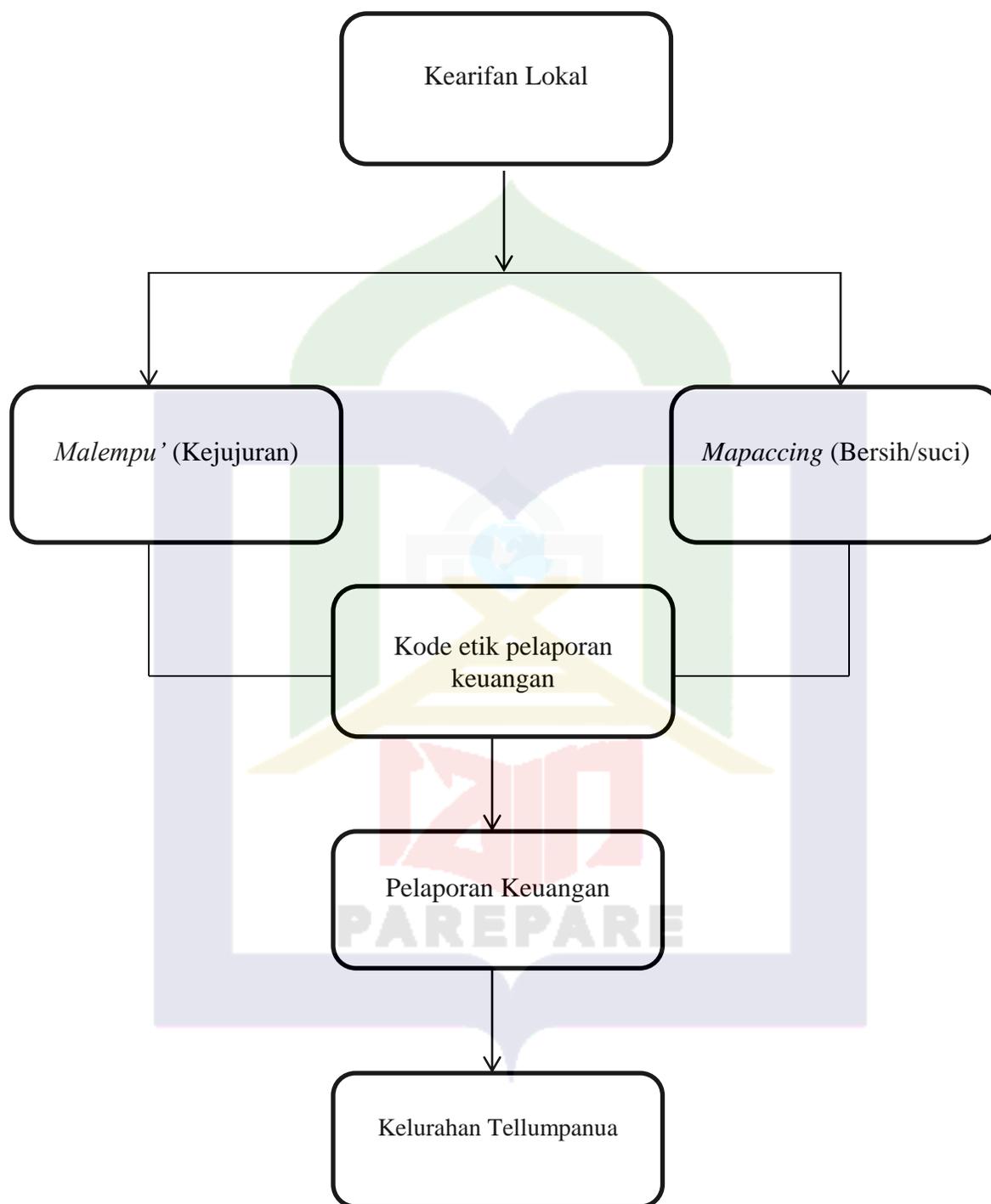
²⁵ Utari Maharani E.S, “Pemanfaatan Dana Kelurahan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana(Studi Kelurahan Bonto Bontoa,Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)”,*Skripsi,Hukum Administrasi Negara (2020)*.

²⁶ Yusuf Abdullah, “Kerangka Pemikiran”, *Deepublishstore (2023)*

dan independensi. Konsep *Malempu'na Mapaccing* ini memiliki hubungan erat dengan Kode Etik Profesi, khususnya bagi akuntan. Ditengah persaingan ketat dalam era globalisasi saat ini, hanya mereka yang siap dan memiliki sikap profesionalisme yang kuat yang dapat berkembang dan bertahan.

Intansi memiliki seorang akuntan yang mematuhi kode etik profesi, maka pelaporan keuangannya akan menjadi terpercaya, karena akan menghindari praktik-praktik yang tidak sah seperti kecurangan atau fraud. Pelaporan keuangan merupakan metode penting yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dilakukan di Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang.





Gambar 2. 1 : Bagan Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode kualitatif yang menggunakan pendekatan etnografi. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara, observasi langsung, partisipasi dalam kehidupan kelompok, serta diskusi kolektif mendalam dengan berbagai narasumber, yang bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai kearifan lokal budaya yang berhubungan dengan kode etik pelaporan keuangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari aparat kelurahan dan warga setempat, dengan pertanyaan yang fokus pada aspek pelaporan keuangan kelurahan dan kearifan lokal yang ada di Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana penelitian dilakukan, memberikan pemahaman yang jelas terhadap penelitian peneliti, dan dalam penelitian ini, lokasinya adalah di Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, dengan batasan wilayah yang spesifik.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian berfokus pada penerapan Kode Etik Pelaporan Keuangan di Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal Budaya Bugis *Malempu' na Mapaccing*.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Sanusi mendefinisikan data primer sebagai informasi yang pertama kali dihimpun dan dicatat oleh peneliti. Dalam proses ini, peneliti memiliki kendali terhadap kualitas data, dapat mengatasi jarak waktu antara kebutuhan data dan ketersediannya, serta memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan dengan potensi data yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang memiliki keahlian dalam mengelola dana kelurahan di Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang.

2. Data sekunder

Sanusi, menjelaskan bahwa data sekunder merupakan informasi yang telah ada sebelumnya dan telah dikumpulkan oleh entitas lain. Peneliti dapat memanfaatkan data tersebut sesuai dengan keperluannya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berasal dari bagian pemerintahan kelurahan Tellumpanua dan juga dokumen-dokumen di Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi, dalam penelitian ini peneliti secara langsung terlibat dalam pengamatan lapangan untuk mengamati aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan dalam mengelola dana Kelurahan.²⁷

2. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer yang sah dan tepat, peneliti akan melakukan wawancara langsung yang mendalam dengan individu yang memiliki kompetensi dalam mengelola dana kelurahan. Selain itu, peneliti juga akan mencatat semua informasi dan peristiwa yang akan diperoleh dari wawancara ini untuk digunakan dalam pembuatan laporan penelitian. Informan yang dianggap kompeten dalam manajemen dana kelurahan adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam bidangnya. Peneliti akan mewawancarai individu seperti Lurah, Pengelola keuangan pembantu, Pengelola barang pembantu dan bendahara Pamsimas.²⁸ Dalam proses wawancara, peneliti akan menggunakan alat perekam untuk memastikan bahwa tidak ada data atau informasi yang terlewatkan saat melakukan analisis nantinya.

3. Dokumentasi

Informasi untuk dokumentasi dengan menggabungkan pengetahuan dari berbagai sumber, termasuk buku yang ada di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa dan jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian ini.

²⁷ Umi Purwanti, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim", *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (Jiask)*, No.2 (2021).

²⁸ Puteri Ainurrohma Romantis, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014, *Jember : Fakultas Ekonomi*, (2015).

Selain itu, data dapat diperoleh dari buku laporan tahunan, informasi yang terdapat di brosur, papan informasi, baliho, RPJMK yang terkait dengan aspek transparansi pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data merujuk pada metode yang digunakan oleh peneliti untuk menilai validitas data yang terkumpul dalam penelitian. Triangulasi data adalah contoh konkret dari cara untuk mengukur sejauh mana kita dapat mempercayai data yang dikumpulkan selama proses penelitian.²⁹ Triangulasi data memanfaatkan sesuatu yang ada diluar data sebagai pembanding seperti :

1. Membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda dengan menggunakan teori yang berbeda untuk menguji data dengan maksud menjelaskan perbedaannya.
2. Membandingkan data yang diperoleh melalui observasi dengan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dari sumber yang sama..
3. Membandingkan tindakan yang terlihat oleh publik dengan apa yang disampaikan secara privat, serta menggunakan penelitian atau pengamatan dari pihak lain untuk mengoreksi data yang terkumpul.

Uraian diatas menjelaskan bahwa teknik uji keabsahan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk menilai tingkat kepercayaan dalam pengumpulan data penelitian, Ini melibatkan perbandingan antara berbagai metode,

²⁹ Helaluddin & Hengki Wijaya, “ Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik”, (Makassar: Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019), h. 132.

sumber data, dan pernyataan dari orang-orang, baik secara publik maupun pribadi, dengan tujuan memastikan keabsahan data yang dikumpulkan oleh peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang diperlukan dalam setiap penelitian ketika data yang telah terkumpul dari lapangan dievaluasi dan diolah untuk menghasilkan kesimpulan yang mencerminkan situasi penelitian. Dalam penelitian ini, data-data yang terhimpun di lapangan diselidiki dan diinterpretasikan, sehingga informasi yang lebih mendalam dapat diperoleh dari data tersebut, membantu peneliti dalam membuat gambaran yang lebih lengkap tentang objek penelitiannya.

Dalam esensinya, analisis data adalah proses pengaturan dan pengorganisasian data ke dalam pola, kategori, dan unit dasar sehingga memungkinkan untuk menemukan tema dan merumuskan kerja berdasarkan data yang ada. Tugas analisis data melibatkan pengaturan, pengurutan, pengelompokan, pemberian kode, dan pengkategorian data yang telah terkumpul, termasuk catatan lapangan, gambar, foto, atau dokumen seperti laporan. Dalam konteks penelitian ini, yang bersifat kualitatif, metode analisis data yang digunakan adalah yang dijelaskan dalam model analisis data Miles dan Huberman.³⁰

Pengumpulan data merupakan tindakan menggali dan menghimpun seluruh informasi yang diperoleh dari sumber seperti observasi, wawancara, dan dokumen tanpa terkecuali. Penyajian data adalah langkah untuk merangkum dan menampilkan data guna memahami keseluruhan gambaran atau aspek tertentu dalam penelitian. Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan,

³⁰ Miles dan Huberman, Analisis data Kualitatif (diterjemahkan Oleh : Tjetjep Rohedi Rosidi), (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), h. 15.

pengabstrakan, dan transformasi data dari catatan lapangan. Kesimpulan dan verifikasi mencakup mencari makna dalam data dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan persamaan yang muncul. Untuk informasi lebih lanjut tentang data kualitatif, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Setelah mendapatkan data dari wawancara dan dokumen, langkah selanjutnya adalah menganalisis data melalui proses reduksi data, penyajian data, dan akhirnya menarik kesimpulan.

2. Reduksi Data.

Pada langkah awal pengurangan data, peneliti akan mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang terdiri dari perangkat Kelurahan Tellumpanua dan sejumlah warga kelurahan. Penelitian ini akan menitikberatkan pertanyaan terkait pengelolaan keuangan Kelurahan dan kearifan lokal di Kelurahan Tellumpanua. Kemudian, peneliti akan menyusun hasil wawancara dengan mencocokkan pertanyaan dan jawaban yang relevan serta mengutamakan informasi yang signifikan, sambil menghilangkan bagian-bagian yang tidak relevan. Selain itu, peneliti juga akan menghimpun bukti-bukti dan dokumen terkait seperti bukti transaksi, laporan keuangan, dan dokumen pendukung lainnya.

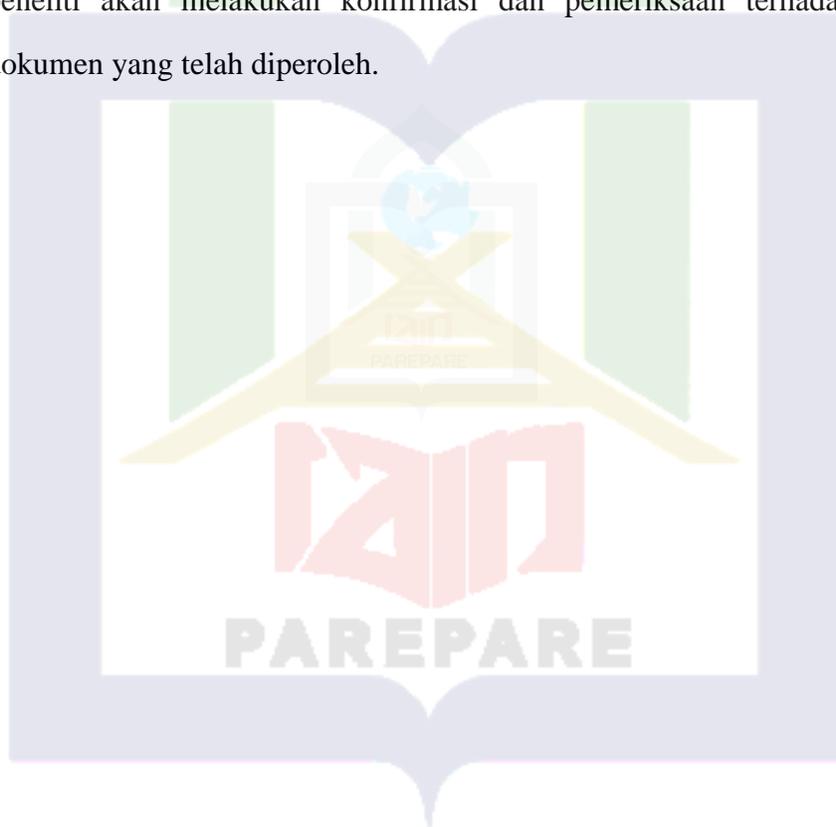
3. Penyajian Data.

Tahap berikutnya adalah penyajian data. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan dijelaskan untuk mengidentifikasi informasi yang penting. Dalam penelitian ini, akan dicari pola dan makna yang mungkin

tersembunyi dalam data dengan membandingkan hasil analisis dengan bukti yang ada.

4. Penarikan Kesimpulan.

Tahap terakhir dalam penelitian adalah menarik kesimpulan. Pada tahap ini, kesimpulan diperoleh melalui verifikasi berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung untuk memastikan relevansi informasi. Selain itu, dilakukan juga triangulasi data sebagai upaya memeriksa validitas data. Dalam konteks ini, peneliti akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap bukti dan dokumen yang telah diperoleh.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk penerapan, kode etik pelaporan keuangan di Kelurahan

Tellumpanua.

Jumlah dana kelurahan yang diterima oleh setiap kelurahan tentu tidak sedikit, dan dalam pengelolaan keuangan yang besar sangat di perlukan yang namanya pelaporan keuangan agar data keuangan terurai secara terinci.

Penulis melakukan wawancara dari beberapa responden sebagai sumber data yang akurat, dan pernyataan diatas lebih di pertegas oleh informan pak Suardi Suaib, SE. Selaku Lurah Tellumpanua yang merangkap sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada 23 Oktober 2023

“ Dana yang turun dari pusat itu ada 2 yaitu dana pemberdayaan masyarakat, dana sarana dan prasarana. Dana sarana dan prasarana itu Rp. 350 juta dan pemberdayaan masyarakat itu Rp. 25 juta. Dana yang Rp. 350 juta akan di musyawarahkan bahwa ini yang akan mengerjakannya sehingga dananya langsung di berikan untuk di realisasikan.”³¹

Data-data anggaran dan realisasi pada dana alokasi umum di Kelurahan Tellumpanua mulai dari tahun 2019-2022.

Rencana Kerja Dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019

Tabel 4.1 RKPA-SKPD 2019 Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang

URAIAN	Rincian Perhitungan	
	Volume	Harga
Rabat beton Lorong LHR Kompleks BTN Bili	1	Rp 18.923.830.000

³¹ Suardi Suaib, Lurah Tellumpanua, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Kelurahan Tellumpanua, 23 Oktober 2023

bili			
Jasa Desain	1	Rp	3.785.000
Jasa Pengawasan	1	Rp	1.892.000
Rabat beton Jalan Baba Siradje	1	Rp	190.036.100
Jasa Desain	1	Rp	3.801.000
Jasa Pengawasan	1	Rp	1.900.000
Rabat Beton Lorong di jalan bompatue	1	Rp	74.531.600
Jasa Desain	1	Rp	1.491.000
Jasa Pengawasan	1	Rp	745.000
Pembuatan Drainase di Lappa-Lappae	1	Rp	69.788.000
Jasa Desain	1	Rp	1.395.000

**Rencana Kerja Dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Kelurahan Tellumpanua Kecamatan
Suppa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020**

Tabel 4.2 RKPA-SKPD 2020 Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang

URAIAN	Rincian Perhitungan	
	Volume	Harga
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		Rp 344.386.300
Pembangunan jalan rabat beton (Jl. H. A. Arsyad) sebelah selatan lapangan	1	Rp 144.320.200
Jasa Desain	1	Rp 2.886.000
Jasa Pengawasan	1	Rp 1.443.000
Pembangunan jalan rabat beton (Jl. H. A. Arsyad) sebelah barat lapangan	1	Rp 190.036.100
Jasa Desain	1	Rp 3.801.000
Jasa Pengawasan	1	Rp 1.900.000

**Rencana Kerja Dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKPA-SKPD) Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten
Pinrang Tahun Anggaran 2021**

Tabel 4.3 RKPA-SKPD 2021 Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang

URAIAN	Rincian Perhitungan	
	Volume	Harga
Belanja jasa pengawasan dan perencanaan Kelurahan Tellumpanua		
Biaya pengawasan pembangunan rabat beton, drainase, talud Kelurahan Tellumpanua		
Pengawasan Konstruksi	Paket	Rp 2.400.000
Biaya perencanaan pembangunan rabat beton, drainase, talud Kelurahan Tellumpanua		
Biaya perencanaan bangunan gedung sederhana	Paket	Rp 5.200.000
Rabat beton Jln. H. Take Link. Labili bili Kelurahan Tellumpanua		
Rabat beton; Lebar 4 M	M1	Rp 800.000
Belanja modal pembuatan talud lingkunagan labili bili Kelurahan Tellumpanua		
Sirtu dengan ptoteksi	M	Rp 357.000
Belanja modal bangunan air		Rp 176.080.000

**Rencana Kerja Dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Kelurahan Tellumpanua Kecamatan
Suppa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022**

Tabel 4.4 RKPA-SKPD 2022 Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang

URAIAN	Rincian Perhitungan	
	Volume	Harga
Rabat beton Lr.1 Jln. Pramuka Kelurahan Tellumpanua		Rp 60.000.000
Rabat beton Lorong 1 Jalan Pramuka	1 paket	Rp 60.000.000
Rabat beton Lr.2 Jln. P. Ganjeng Kelurahan Tellumpanua		Rp 135.000.000
Rabat beton Lorong 2 Jalan P. Ganjeng	1 paket	Rp 135.000.000
Drainase Jln. Pramuka Kelurahan Tellumpanua		Rp 155.000.000
Drainase Jalan Pramuka	1 paket	Rp 155.000.000

Sumber Data: Lembaran Laporan Pertanggung jawaban

Uraian lebih jelas mengenai bentuk penerapan, kode etik pelaporan keuangan di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang, penulis menguraikan hasil wawancara dari beberapa responden sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan diatas lebih di pertegas oleh informan Tahir, S.Ak selaku Pengelola Keuangan Pembantu di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang pada 23 Oktober 2023.

“Iya, setelah dana yang turun dari pusat itu ada Rp 350 juta untuk sarana dan prasarana, kemudian Rp 25 juta untuk pemberdayaan masyarakat itu kami akan melakukan musyawarah untuk langsung menentukan dana yang akan di realisasikan yang sudah dirancang pembangunannya sampai tahun 2023 contohnya kemudian diberikan kepada masing-masing bidang yang diberikan tanggung jawab.”³²

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Syaharuddin selaku pengelola barang pembantu di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang pada 23 Oktober 2023.

“Berbeda dengan desa yang memiliki bidang-bidang tertentu untuk mengelola dana desa yang turun dari pusat, Di kelurahan tidak ada bidang tertentu yang mengelola dana tersebut kami langsung memusyawarahkan hal-hal apa saja yang memerlukan dana seperti yang sudah dirancang sebelumnya lalu langsung kami realisasikan menggunakan dana yang turun dari pusat yang dibagi jadi 2 bagian dana seperti yang dikatakan pak lurah dan pak tahir.”³³

Wawancara kembali dilakukan menggunakan pertanyaan yang berbeda dengan informan yang berbeda, Tahir, S.Ak selaku pengelola keuangan pembantu, pada 23 Oktober 2023.

“Kami di kelurahan ini tentu punya proses pelaporan keuangan yang dilaksanakan per 3 bulan. Awal mula untuk mengajukan pencairan dana kelurahan itu di mulai dari bendahara kelurahan itu mengajukan permintaan kepada pemerintah daerah untuk proses pencairan dana yang telah terincikan, kemudian ketika dana sudah cair dibuatkan LPJ sesuai dengan

³² Tahir, S.Ak, Pengelola Keuangan Pembantu Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Kelurahan Tellumpanua, 23 Oktober 2023

³³ Syaharuddin, Pengelola Barang Pembantu Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Kelurahan Tellumpanua, 23 Oktober 2023

apa yang dirincikan tersebut lalu setelah dibuatkan LPJ kemudian di input kedalam aplikasi SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah).³⁴

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang berbeda namun informan yang sama, Tahir,S.Ak selaku pengelola keuangan pembantu di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang pada 23 Oktober 2023.

“Berbicara mengenai apakah pemerintah kelurahan tellumpanua menerapkan kode etik pelaporan keuangan dalam pengelolaan dana jawaban dari saya itu kalau kode etiknya kami sudah menerapkannya seperti tanggung jawab, objektivitas dan lain sebagainya tapi berbicara mengenai pelaporan keuangan itu kami hanya terfokus pada pelaporan penggunaan anggarannya, intinya dikelurahan itu Cuma pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.”³⁵

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Syaharuddin selaku pengelola barang pembantu di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang pada 23 Oktober 2023.

“ Iya, kami dikelurahan hanya terfokus pada pelaporan pertanggungjawaban anggaran, kami buat LPJ lalu pelaporan keuangannya itu di pemerintah daerah kita cuman menginput hasil LPJ di aplikasi yang tadi SIKD nanti pemerintah daerah yang kelola itu.”³⁶

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Nurlina,S.Ak selaku KPSPAM SEPAKAT di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang pada 23 Oktober 2023.

“Saya sebagai bendahara pamsimas dalam pelaporan keuangan menerapkan kode etik pelaporan keuangan SAK Umum, yang digunakan itu buku kas umum.”³⁷

³⁴ Tahir,S.Ak, Pengelola Keuangan Pembantu Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Kelurahan Tellumpanua, 23 Oktober 2023

³⁵ Tahir,S.Ak, Pengelola Keuangan Pembantu Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Kelurahan Tellumpanua, 23 Oktober 2023

³⁶ Syaharuddin, Pengelola Barang Pembantu Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Kelurahan Tellumpanua, 23 Oktober 2023

³⁷ Nurlina,S.Ak, KPSPAM SEPAKAT Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Kelurahan Tellumpanua, 23 Oktober 2023

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemerintah Kelurahan Tellumpanua dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kelurahan Tellumpanua menggunakan sistem akuntansi manual, dimana pada saat mengelola keuangan (dana kelurahan) mereka mencatat kedalam buku kemudian setiap akhir tahun mereka membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kemudian menginputnya kedalam aplikasi SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah), disitulah nanti pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Pinrang akan mengelola keuangan sesuai pelaporan penggunaan anggaran dari Kelurahan Tellumpanua.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Kelurahan Tellumpanua sebagai sumber data yang akurat mengenai tanggapan masyarakat terhadap pengelolaan dana kelurahan oleh pemerintah Kelurahan Tellumpanua. Informan bernama Hasmirati,S.ST selaku salah satu warga Kelurahan Tellumpanua, pada 24 Oktober 2023.

“Sebagai masyarakat Kelurahan Tellumpanua jika dilihat dari pengelolaan dana kelurahan, pemerintah kelurahan itu sudah transparansi, karena setiap kali ada pembangunan maupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kelurahan selalu melalui musyawarah terlebih dahulu tapi mungkin ada masyarakat juga yang tidak hadir dalam musyawarah tersebut hanya menerima saja keputusan dari pemerintah kelurahan karena dianggap itulah putusan yang terbaik buat kelurahan nantinya. Kalau berbicara mengenai kode etik pelaporan saya kira sudah cukup bertanggung jawab, sudah objektivitas dalam pelaporan keuangannya dan yang paling penting bentuk fisik dari pembangunannya pun sudah terlihat.”³⁸

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Nawir Usman Isa selaku warga Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang pada 24 Oktober 2023.

“Pengelolaan dana oleh pemerintah kelurahan tellumpanua kalau menurut saya itu sudah sangat baik transparansi juga, karena setiap kegiatan atau ada

³⁸ Hasmirati,S.ST, Masyarakat Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Kelurahan Tellumpanua, 24 Oktober 2023

pembangunan pemerintah kelurahan itu selalu mengirim undangan rapat ke perwakilan warga dan warga pun bisa ikut juga jika mau.”³⁹

Penulis dalam wawancara diatas menerapkan teori fenomenologi dengan menggunakan pengalaman hidup sebagai landasan untuk memahami konteks sosial, budaya, politik, dan sejarah. Dalam proses wawancara, informan dari Pemerintah Kelurahan Tellumpanua merespons pertanyaan peneliti berdasarkan pengalaman hidup mereka selama menjabat sebagai Pemerintah Kelurahan, mencakup aspek-aspek pengalaman politik, sosial, dan budaya dalam pelayanan kepada masyarakat Kelurahan Tellumpanua.

2. Peran Kearifan lokal *malempu' na mapaccing* pada pelaporan keuangan di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang.

Uraian lebih jelas mengenai pentingnya sebuah kearifan lokal dijadikan landasan dalam pelaporan dana kelurahan di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang, penulis menguraikan hasil wawancara dari beberapa responden sebagai sumber data yang akurat, dan pertanyaan diatas lebih di pertegas oleh informan Tahir,S.Ak selaku pengelola keuangan pembantu di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang pada 23 Oktober 2023.

“ Iya, sangat penting jika kearifan lokal dijadikan sebuah landasan dalam pelaporan keuangan kelurahan karena banyak melalui peraturan-peraturan kelurahan yang memang tercipta karena adanya kearifan lokal, salah satunya itu dilaksanakannya musyawarah kelurahan dimana kita melibatkan masyarakat untuk mengetahui keadaan dana kelurahan tentunya mengedepankan etika jujur, terbuka dan bersih. Musyawarah kelurahan itu kebiasaan dari dulu masyarakat disini yang biasanya kegiatan tersebut kita beri nama *Tudang Sipulung* (Rapat).”⁴⁰

³⁹ Nawir Usman Isa, Masyarakat Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Kelurahan Tellumpanua, 24 Oktober 2023

⁴⁰ Tahir,S.Ak, Pengelola Keuangan Pembantu Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Kelurahan Tellumpanua, 23 Oktober 2023

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Syaharuddin selaku pengelola barang pembantu di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang pada 23 Oktober 2023.

“Untuk saya penting karena menghindari adanya KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), dan jujur kami disini bekerja menggunakan sistem kekeluargaan dalam artian warga yang kami layani kami anggap keluarga bukan orang lain, karena dari dulu di kantor kelurahan ini pegawai-pegawainya memang seperti itu, enak rasanya kalau *sipakamase maseki*’ dalam mengerjakan sesuatu.”⁴¹

Hal itu kembali dipertegas oleh informan lain, Nurlina,S.Ak selaku bendahara KPSPAM SEPAKAT Kelurahan Tellumpanua, pada 23 Oktober 2023.

“Untuk KPSPAM sendiri kami selalu berusaha menyesuaikan dengan keadaan warga sebelum merancang sesuatu, seperti kita ketahui kita ini suku bugis banyak pesan-pesan dari orangtua yang lebih dulu menjabat dikantor ini dijadikan sebagai teladan untuk kami, dan juga sekarang itu zamannya serba canggih tidak seperti dulu sesuatu yang dikerjakan dengan tradisonal, jadi intinya kami hanya menyesuaikan.”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemerintah Kelurahan Tellumpanua dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kelurahan Tellumpanua menganggap kearifan lokal sangat penting untuk dijadikan landasan dalam pelaporan keuangan. Dibuktikan dengan kearifan lokal yang sehari-hari mereka terapkan yaitu gotong royong, *Sipakamase-mase*, dan *Tudang Sipulung* (Rapat). Pemerintah kelurahan sangat menghargai pesan-pesan orang terdahulu sebelum mereka yang menjabat, mereka menjadikan pedoman dari pesan-pesan tersebut. Sebagai suku bugis sudahlah sewajarnya menghargai yang namanya kearifan lokal, karena itu merupakan warisan dari orang terdahulu kita. Dalam pelaporan keuangan kelurahan bisa dikatakan orang terdahulu lebih lihai dalam mengelola walaupun cara yang digunakan masih sederhana.

⁴¹ Syaharuddin, Pengelola Barang Pembantu Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Kelurahan Tellumpanua, 23 Oktober 2023

⁴² Nurlina,S.Ak KPSPAM SEPAKAT Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Kelurahan Tellumpanua, 23 Oktober 2023

Wawancara kembali dilakukan dengan informan, Suardi Suaib,SE selaku lurah tellumpanua yang merangkap sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), pada 23 Oktober 2023.

“Iya betul, yang dilaksanakan itu kearifan lokal seperti yang kita maksud *malempu’ na mapaccing* bahwa kami disini akan berusaha tetap menjunjung tinggi yang namanya jujur dan bersih dalam hal pelaporan keuangan.”⁴³

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Tahir,S.Ak selaku pengelola keuangan pembantu di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pintang pada 23 Oktober 2023.

“Iya penting *malempu’ na mapaccing* kami tentu akan berusaha agar jujur dan bersih dalam pelaporan keuangan karena itu berbicara tentang dana pembangunan untuk kelurahan yang harus dilaporkan sesuai yang ada dilapangan atau yang sudah direalisasikan untuk masyarakat tentunya.”⁴⁴

Sependapat dengan informan sebelumnya, Syaharuddin selaku pengelola barang pembantu, pada 23 Oktober 2023.

“Itulah yang selalu kami usahakan, kami memang butuh orang yang *malempu’ na mapaccing* jujur dan bersih, jika berbicara tentang sumber daya manusia seperti itulah yang selalu kami utamakan dalam melayani masyarakat.”⁴⁵

Hal itu kembali dipertegas oleh informan lain, Nurlina,S.Ak selaku KPSPAM SEPAKAT, pada 23 Oktober 2023.

“Harus jujur dek, kami mengelola uang khusus pamsimas itu menurut kami bukan uang yang sedikit, bahkan kalau misalnya ada keperluan seperti membeli pulpen atau buku kami memilih memakai uang pribadi kami sendiri karena kami takut dengan pertanggung jawabannya apabila ada yang

⁴³ Suardi Suaib,SE, Lurah Tellumpanua Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Kelurahan Tellumpanua, 23 Oktober 2023

⁴⁴ Tahir,S.Ak, Pengelola Keuangan Pembantu Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Kelurahan Tellumpanua,23 Oktober 2023

⁴⁵ Syaharuddin, Pengelola Barang Pembantu Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Kelurahan Tellumpanua, 23 Oktober 2023

kurang, jika tentang bersih kami berusaha sebersih-bersihnya dalam pelaporan keuangan itu kembali lagi ke diri masing-masing.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah Kelurahan Tellumpanua menyatakan komitmen penerapan nilai-nilai *Malempu; Na Mapaccing* dalam pelaporan keuangan. *Malempi'*, yang merujuk pada jujur, ditekankan sebagai prinsip yang harus ditingkatkan melalui pengembangan sumber daya manusia. *Mapaccing*, yang menggambarkan kebersihan, dipandang sebagai kewajiban bagi pemerintah kelurahan dalam hal pelaporan keuangan. Mereka percaya bahwa integritas pejabat adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan atau korupsi di Kelurahan Tellumpanua.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Kelurahan Tellumpanua sebagai sumber data yang akurat mengenai tanggapan masyarakat terhadap kearifan lokal *malempu' na mapaccing* sebagai landasan pemerintah Kelurahan Tellumpanua dalam pelaporan keuangan. Informan bernama Hasmirati, S.ST selaku salah satu warga Kelurahan Tellumpanua, pada 24 Oktober 2023.

“Terkait dengan 2 poin tersebut yaitu *malempu' na mapaccing* artinya jujur dan bersih, menurut saya memang seharusnya pemerintah kelurahan memiliki kedua poin itu dimana dalam pelaporan keuangan kelurahan membutuhkan yang namanya akuntabilitas yang baik dan tentunya transparansi terhadap masyarakat, dan tentunya prosedur yang juga menjadi landasan.”⁴⁷

Wawancara kembali dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda, Nawir Usman Isa selaku warga Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang pada 24 Oktober 2023.

⁴⁶ Nurlina, S.Ak, KPSPAM SEPAKAT Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Kelurahan Tellumpanua, 23 Oktober 2023

⁴⁷ Hasmirati, S.ST, Masyarakat Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Kelurahan Tellumpanua, 24 Oktober 2023

“Menurut saya jika mengenai kejujuran pemerintah Kelurahan Tellumpanua saya tidak ragukan lagi karena selama ini pemerintah Kelurahan Tellumpanua sudah sangat transparan selalu melibatkan warga, kalau masalah bersih saya kurang tau karena kita tidak bisa menilai ini orang bersih dengan begitu saja, tapi jika untuk saya akhlak lebih utama salah satunya itu bersikap jujur.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Kelurahan Tellumpanua dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kelurahan Tellumpanua sangat transparansi dalam mengelola dana kelurahan dimana masyarakat selalu dilibatkan dan itu sudah memenuhi nilai hidup suku bugis yaitu *malempu*. Adapun *mapaccing* bagi masyarakat juga penting dimiliki oleh pemerintah Kelurahan Tellumpanua untuk menghasilkan Akuntabilitas yang baik.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Bentuk penerapan, kode etik pelaporan keuangan di Kelurahan Tellumpanua

Kode etik pelaporan keuangan merupakan peraturan yang harus diikuti oleh pembuat standar akuntansi saat mereka merancang standar akuntansi. Selain itu, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan juga harus mematuhi kode etik ini dalam menjalankan tugas mereka. Pengguna laporan keuangan juga diharapkan mematuhi kode etik ini dalam rangka memahami informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.⁴⁹ Prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan keuangan negara tidak hanya berlaku untuk pemerintah pusat, melainkan juga untuk entitas daerah seperti kelurahan.

Tujuan etika akuntansi adalah untuk menjaga kepentingan masyarakat, memastikan kewajaran dalam pelaporan keuangan, mencegah kecurangan, serta membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, tujuan lainnya adalah menyediakan informasi yang komprehensif, akurat, dan relevan sehingga dapat digunakan sebagai

⁴⁸ Nawir Usman Isa, Masyarakat Kelurahan Tellumpanua, Kabupaten Pinrang wawancara dilakukan di Kelurahan Tellumpanua, 24 Oktober 2023

⁴⁹ Umi Riyanti, “Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pada Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan”, (*Skripsi sarjana : fakultas ekonomi dan ilmu sosial 2011*) h 21.

dasar penilaian keputusan keuangan masa lalu dan sebagai panduan bagi pihak eksternal, termasuk pemerintah daerah, untuk masa depan. Hal ini bertujuan agar pelaporan keuangan menjadi tanggung jawab di seluruh kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Kelurahan Tellumpanua dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kelurahan Tellumpanua sudah baik dalam mengelola dana kelurahan. Namun, berdasarkan observasi awal ditemukan adanya masalah miskomunikasi antara masyarakat dengan pemerintah kelurahan. Miskomunikasi terjadi pada saat dana yang turun dari pusat untuk kelurahan maka pemerintah kelurahan segera melakukan musyawarah untuk membicarakan kebijakan atau pembangunan apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan anggaran tersebut. Ketika kegiatan musyawarah hendak dilakukan maka pemerintah Kelurahan Tellumpanua akan menyebarkan undangan dan panggilan kepada masyarakat setempat untuk hadir didalam musyawarah tersebut. Namun, tidak sedikit masyarakat acuh tak acuh terhadap undangan tersebut sehingga ketika masyarakat merasakan tidak ada dampak atas kebijakan dari pemerintah disitulah masyarakat beranggapan pemerintah tidak memenuhi tanggung jawab atas dana yang turun dari pusat.

Pemerintah kelurahan melibatkan masyarakat dalam mengelola dana kelurahan dengan mengadakan musyawarah bersama sebelum menggunakan dana kelurahan karena untuk mencapai yang namanya transparansi, organisasi atau instansi harus memberikan informasi terkait kegiatan dan tata kelola kepada para pemangku kepentingan yang akurat, lengkap dan tersedia secara tepat waktu. Ini berarti tidak semua informasi tersedia untuk umum.⁵⁰ Contohnya dalam pembangunan kelurahan, pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusianya dan lain-lain.

Penulis mengambil perbandingan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Yamin dalam penelitiannya yang berjudul “Penggunaan Dana

⁵⁰ Andi Ayu Frihatni, Nirwana Nirwana, and Syamsuddin Syamsuddin, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare,” *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 3 (2021): 229-39, <https://doi.org/10.31850/economos.v4i3.919>.

Desa Yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal” dimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yamin ini menemukan bahwa salah satu pendekatan yang digunakan untuk penggunaan dana desa oleh masyarakat untuk mengatasi penyimpangan kode etik akuntan ini adalah menerapkan nilai-nilai budaya sebagai bentuk kearifan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa dengan harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan evaluasi penggunaan dana desa berada dibawah tanggung jawab pemerintah desa.⁵¹ Perbedaan penelitian Ahmad Yamin dengan peneliti terletak pada topik dan fokus penelitian. Penelitian Ahmad Yamin lebih memusatkan pada persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya desa secara partisipatif berbasis kearifan lokal tentunya dengan kesadaran pemerintah desa yang menerapkan kode etik akuntan, sementara peneliti lebih fokus pada penerapan kode etik pelaporan keuangan berbasis kearifan lokal di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang, dengan penekanan pada kearifan lokal yang disebut *Malempu’ Na Mapaccing*.

2. Peran Kearifan Lokal Malempu’ Na Mapaccing Pada Pelaporan Keuangan di Kelurahan Tellumpanua

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemerintah Kelurahan Tellumpanua dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kelurahan Tellumpanua menganggap kearifan lokal sangat penting untuk dijadikan landasan dalam pelaporan keuangan. Dibuktikan dengan kearifan lokal yang sehari-hari mereka terapkan yaitu gotong royong, *Sipakamase-mase*, dan *Tudang sipulung* (Rapat). Pemerintah kelurahan sangat menghargai pesan-pesan orang terdahulu sebelum mereka yang menjabat, mereka menjadikan pedoman dari pesan-pesan tersebut. Sebagai suku bugis sudahlah sewajarnya menghargai yang namanya kearifan lokal, karena itu merupakan warisan dari orang terdahulu kita. Dalam pelaporan keuangan kelurahan bisa dikatakan orang terdahulu lebih lihai dalam mengelola walaupun cara yang digunakan masih sederhana.

⁵¹ Ahmad Yamin, “Penggunaan Dana Desa Yang Partisipatif Berbasis Kearifan Loka”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, No.2 (2021)

Kearifan lokal merupakan bagian integral dari budaya suatu masyarakat, tak terpisahkan dari bahasa yang digunakan. Umumnya, kearifan ini diwariskan secara turun temurun melalui tradisi lisan, seperti yang terjadi pada Suku Bugis. Mereka memiliki ciri khas dalam nilai hidup, bahasa, dan budaya yang melekat pada kearifan lokal mereka.

Armia turunan konsep budaya dari program mental, yang dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Tingkat universal, yaitu mentalitas program yang dimiliki semua individu mencapai tingkat universal. Dimana program mental ini sepenuhnya terkait dengan masyarakat.
- b. Tataran kolektif, merujuk pada pola pikir yang dimiliki oleh sebagian individu, bukan seluruh populasi. Pada tingkat ini, pola pikir tersebut terkait dengan kelompok spiritual tertentu dan dapat diakses untuk dipahami.
- c. Tingkatan individu, mencakup program spiritual yang unik, dimana setiap orang memiliki program spiritual yang berbeda dan tidak ada dua program yang persis sama.

Dengan kecepatan ini, sebagian kecil program spiritual terkait dengan individu, sementara yang lain dapat memperoleh pembelajaran dari masyarakat, organisasi, atau entitas lainnya.

Ilmu-ilmu sosial seringkali tidak dapat diukur secara langsung dengan konstruk, sehingga memerlukan setidaknya dua ukuran berbeda. Program spiritual Armila dijelaskan melalui dua kontrak utama, yaitu nilai dan budaya. Nilai mengacu pada kecenderungan umum dalam menggambarkan suatu hal dalam hubungannya dengan yang lain, mencakup pengukuran keyakinan, sikap, dan kepribadian. Sementara itu, budaya merupakan program mental yang melibatkan pikiran, emosi, dan tindakansering disebut sebagai “perangkat lunak mental”. Pemrograman ini dimulai dari lingkungan keluarga dan meluas ke lingkungan sekitarnya, termasuk sekolah, kelompok remaja, lingkungan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, budaya menciptakan sistem nilai yang dipeluk oleh berbagai lingkungan, mulai dari keluarga hingga masyarakat secara luas.

Warisan budaya ditransmisikan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui beberapa cara, termasuk keluarga dan komunitas. Keluarga sebagai unit sosial terkecil memegang peran penting dalam melestarikan nilai-nilai, tradisi, dan bahasa, sementara komunitas juga berperan dalam melestarikan budaya melalui upacara, cerita rakyat, mitologi, ritual, dan lagu-lagu tradisonal. Setiap daerah memiliki warisan budaya yang unik yang dijaga secara turun temurun, yang membedakan satu daerah dari yang lainnya.

Akuntansi dan budaya saling terkait. Akuntansi mempengaruhi budaya dan sebaliknya. Jadi, jika dipahami dengan baik, acara SAHABAT ini merupakan platform dimana akuntansi dan budaya saling berpadu. Setiap tahun, dengan lokasi yang berbeda, peserta mendiskusikan bagaimana praktik akuntansi dapat disesuaikan dengan budaya setempat, memanfaatkan keberagaman budaya Indonesia sebagai inspirasi untuk perkembangan model akuntansi yang inklusif. Ini menggambarkan bagaimana akuntansi tidak hanya beradaptasi dengan budaya, tetapi juga tumbuh bersamadengan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Ahli budaya yang turut dalam acara ini memainkan peran penting dalam membangun dasar pengetahuan yang mendukung pengembangan akuntansi setempat.

Peneliti telah meneliti kearifan lokal Suku Bugis khususnya tentang konsep "*Malempu' Na Mapaccing*" yang menggambarkan jujur dan bersih dalam nilai-nilai hidup. Jujuritas sangat penting dalam pelaporan keuangan Kelurahan Tellumpanua karena memastikan pelaporan keuangan yang bijaksana untuk masa depan. Namun, hanya kejujuran itu saja tidak cukup, akhlak yang bersih dan transparansi juga krusial. Bersih dalam bekerja bukan hanya membangun karir, tetapi juga menjadi fondasi dalam mencegah penyalahgunaan dana kelurahan. Oleh karena itu, selain

kejujuran pemerintah kelurahan juga perlu menganut nilai “*Mapaccing*” atau bersih.

Teori *behaviour* mengaitkan kearifan lokal dengan etika, dimana salah satunya adalah nilai-nilai masyarakat. Nilai bisa mencakup karakter yang dimiliki individu sejak kecil, tetapi teori ini menyoroiti bagaimana karakter bisa berubah karena berbagai faktor.

Hal itu terjadi bahwa tergambar Pemerintah Kelurahan Tellumpanua mengajarkan nilai jujur sejak dini, yang diimplementasikan dalam pelaporan keuangan. Kecurangan tak pernah terjadi, menegaskan integritas dalam menjalankan tugas. Hal ini mencerminkan ketaatan pada kode etik, yang mempromosikan perilaku baik dan kepatuhan pada norma sosial.

Teori *behaviour* ini menjelaskan bagaimana seseorang bisa mengubah perilakunya berdasarkan faktor tertentu. Dalam hasil wawancara di Kelurahan Tellumpanua, terlihat bahwa para pejabat pemerintah disana sangat mengikuti aturan tersebut dengan cara lebih memilih menggunakan uang pribadi untuk kebutuhan kecil seperti membeli buku atau pulpen, daripada memanfaatkan dana dari Kelurahan.

Penulis mengambil perbandingan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syafridayani dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Falsafah Budaya Bugis *Malempu’ na Mapaccing* Dalam Mengelola Keuangan Desa Untuk Menekan Praktik Kecurangan (Fraud)”. Hasil penelitian yang dilakukan Syafridayani ini menemukan bahwa aparat desa Pattiro Bajo menganggap falsafah *Malempu’ na Mapaccing* sebagai nilai budaya yang sangat cocok untuk diterapkan di instansi pemerintahan. Nilai budaya ini, yang dipahami dan diterapkan oleh mereka dapat mengendalikan tindakan individu dalam pengelolaan keuangan desa. Ini menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan Allah SWT.⁵² Perbedaan penelitian Syafridayani dengan peneliti yaitu Syafridayani berfokus pada penerapan falsafah budaya bugis *Malempu' Na Mapaccing* dalam mengelola keuangan desa untuk mengurangi praktik kecurangan. Sementara peneliti berfokus pada Pemerintah Kelurahan Tellumpanua menjadikan kearifan lokal *Malempu' Na Mapaccing* menjadi penting sebagai landasan dalam kode etik pelaporan keuangan.

Secara garis besar berdasarkan hasil wawancara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, pemerintah Kelurahan Tellumpanua menggunakan sistem Akuntansi dalam mengelola dana kelurahan. Pelaporan keuangan yang digunakan ada dua yaitu manual dan melalui penginputan aplikasi khusus yaitu SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah). Kemudian pelaporannya pada akhir tahun dengan memaparkan LPJ lalu diteruskan ke kecamatan, lalu kabupaten, selanjutnya provinsi dan terakhir ke pusat. *Kedua*, kearifan lokal *Malempu' Na Mapaccing* menjadi landasan dalam mengelola dana Kelurahan dimana pemerintah Kelurahan mengupayakan memiliki kejujuran dan kebersihan dalam pelaporan keuangan kelurahan.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang serupa penelitian ini sangat erat dengan kearifan lokal masyarakat, dengan menjadikan prinsip hidup *Malempu' Na Mapaccing* (jujur dan bersih) menjadi landasan dalam pelaporan keuangan kelurahan.

⁵² Syafridayani, "Kajian Falsafah Budaya Bugis *Malempu' Na Mapaccing* Dalam Mengelola Keuangan Desa Untuk Menekan Praktik Kecurangan (Fraud), 2018 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Studi Penerapan Kode Etik Pelaporan Keuangan Berbasis Kearifan Lokal Budaya Bugis *Malempu’ Na Mapaccing* Di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang” maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kelurahan Tellumpanua menggunakan kode etik akuntansi dalam mengelola dana desa, pelaporan keuangan yang digunakan ada dua yaitu manual dan penginputan pada aplikasi khusus. Contoh akuntansi manual menggunakan laporan kas umum, persamaan dasar akuntansi, dan neraca yang dicatat dalam buku khusus, sedangkan dalam menggunakan aplikasi ada yang dinamakan aplikasi SIKD (system informasi keuangan daerah) semua data keuangan diinput kedalam aplikasi tersebut kemudian dilaporkan ke kecamatan, lalu kabupaten, selanjutnya provinsi, dan terakhir akan sampai ke pusat.
2. Pemerintah Kelurahan Tellumpanua menjadikan kearifan lokal menjadi penting sebagai landasan dalam mengelola dana kelurahan. Kearifan lokal yang dilestarikan seperti gotong royong, *tudang sipulung*, dan *sipakamase-mase* dalam menjalankan amanah. Adapun kearifan lokal *malempu’ na mapaccing* pemerintah Kelurahan Tellumpanua selalu dan akan berusaha memiliki dua point tersebut karena itu sudah ditanamkan sejak lama oleh orang terdahulu yang bekerja di kantor Kelurahan Tellumpanua.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang.

Bagi Pemerintah Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang sebaiknya mempergunakan teknologi lebih lanjut dalam mengelola dana kelurahan daripada hanya mengandalkan akuntansi manual, bisa menggunakan aplikasi Exel atau solusi aplikasi lainnya untuk mempercepat proses, mempermudah akses, dan tidak hanya terbatas pada aplikasi SIKD untuk bagian keuangan saja, tetapi dapat diakses juga oleh departemen lain.

2. Bagi Penulis dan Peneliti Selanjutnya.

Bagi penulis, penelitian ini memberikan dorongan untuk terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan masyarakat secara luas sambil memberikan manfaat kepada pembaca. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk mencari teori yang lebih kuat yang mendukung permasalahan yang akan diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim dan Hadits Sunnah.

Jurnal

- Anggraini, Fauziah Galuh, And Anis Chariri. 2014. "Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi Pada Pengelolaan Candi Borobudur)." Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
- Dian Alifka.R "Analisis Falsafah Budaya Bugis "Mapaccing,Malempu Na Magegetteng" Dalam pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Kecurangan Vol 6,No.004(2020).
- Frihatni, Andi Ayu, Nirwana Nirwana, and Syamsuddin Syamsuddin. "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare." *Economos :Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4. no. 3 (2021): 229-39. <https://doi.org/10.31850/economos.v4i3.919>.
- Hamid, Abdul, and Muhammad Kamal Zubair. "Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah." *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2019): 16-34. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1037>.
- Jannah, Sa'adal, Siradjuddin Siradjuddin, And Syaharuddin Syaharuddin. 2020. "Internalisasi Nilai-Nilai Macca' Na Malempu' Dalam Etika Bisnis Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Kepuasan Pelanggan CV. Idran Waranie Perkasa (Mabello Indonesia)." *Al-Maashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 4 (2): 42. <https://Doi.Org/10.24252/AI-Mashrafiyah.V4i2.15194>
- Kurniasari, Nendah, And Elly Reswati. 2011. "Kearifan Lokal Masyarakat Lamalera: Sebuah Ekspresi Hubungan Manusia Dengan Laut." *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 6 (2): 29–33. <http://dx.doi.org/10.15578/marina.v6i2.5810>.
- Mashuri, Suwarno, Teguh Pranowo, "Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Perspektif Community Driven Development," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*, No.1 (2020).
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, And Others. 1992. "Analisis Data

Kualitatif.” Jakarta: Ui Press.

Nasruddin "Kearifan Lokal Dalam Pappaseng Bugis" (2010)

O. Hasbiansyah, “Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Ilmu Parakti Penelitian Dalam Ilmu Social Dan Komunikasi”, *Jurnal MediaTor* , No.1(2008)

Purwanti, Umi. 2021. “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.” *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (Jiask)* 3 (2): 79–90. <https://doi.org/10.48093/Jiask.V3i2.35>.

Putra, Adrie, Sri Handayani, And Ari Pambudi. 2013. “Perilaku Pengendalian Diri Pada Perilaku Manajemen Keuangan Personal Berdasarkan Pada Teori Planned Behavior Menggunakan Pendekatan Partial Least Square.” *Jp Feb Unsoed* 3 (1): 309–14.

Romantis, Puteri Ainurrohma. 2015. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014.”

R.Njatrijani, “Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang”, *Gema Keadilan*, vol.5, no.1, pp. 16-31, Oct. 2018. <https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580>.

Syafridayani "Kajian Falsafah Budaya Bugis *Malempu Na Mapaccing* Dalam Mengelola Keuangan Desa Untuk Menekan Praktik Kecurangan (Fraud), 2018 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi

Wijaya, Hengki, And Others. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Yamin, Ahmad. 2021. "Penggunaan Dana Desa Yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal." *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5 (2). <https://doi.org/10.36312/Jisip.V5i2.1955>.

Yasa, I Nyoman Putra, "PERAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR DAN NILAI KEARIFAN LOKAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK : SEBUAH KAJIAN EKSPERIMEN", 149.32 (2017), 149-67<<https://doi.org/10.24034/j25485024,y2019.v3.i2.4082>>

Yuliana, Ayuk, "PENERAPAN STANDAR PELAPORAN KEUANGAN SERTA HUBUNGANNYA DENGAN", 10.2 (2023).

Yolanda Permata Sari, "Implementasi Dana Kelurahan Untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pada Masa Covid-19 Di Kota Metro", *Jurnal Ilmiah Jatinangor*, 2021.

"5 Kode Etik Yang Dimiliki Seorang Akuntan Publik Profesional." Accessed April 9, (2023)

SKRIPSI

Andi Besse Nurlan, "Persepsi Akuntan Dan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia," (*Skripsi Sarjana : Fakultas Ekonomi 2011*) h.14

Arya Surya Prawira, "Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyyah", *Skripsi, Hukum Tatanegara* (2022)

Umi Riyanti, "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan", (*Skripsi sarjana : fakultas ekonomi dan ilmu sosial 2011*) h 21.

Utari Maharani E.S, "Pemanfaatan Dana Kelurahan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana(Studi Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)", (*Skripsi sarjana : fakultas hukum administrasi negara 2020*).

Buku

Rorong, Michael Jibrael. 2020. *Fenomenologi*. Deepublish.

Yusuf Abdullah. 2023. *Kerangka pemikiran*. Deepublishstore

Informan Penelitian

Suardi Suaib, SE. Wawancara 23 Oktober 2023.

Tahir, S.Ak. Wawancara 23 Oktober 2023.

Syahrudin. Wawancara 23 Oktober 2023.

Nurlina, S.Ak. Wawancara 23 Oktober 2023.

Hasmirati, S.ST., Kep. Wawancara 24 Oktober 2023.

Nawir Usman Isa. Wawancara 24 Oktober 2023

KERANGKA ISI TULISAN (OUTLINE)

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGAJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Kegunaan Penelitian

BAB II. TINJAUAN PENELITIAN

A. Tinjauan Penelitian Relevan

B. Tinjauan Teori

C. Kerangka Konseptual

D. Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

C. Fokus Penelitian

D. Jenis dan Sumber Data

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

F. Uji Keabsahan Data

G. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan kode etik dalam pengelolaan dana alokasi umum di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang.
- B. Nilai-nilai kearifan lokal *malempu' na mapaccing* yang menjadi landasan dalam penerapan kode etik pengelolaan dana alokasi umum di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

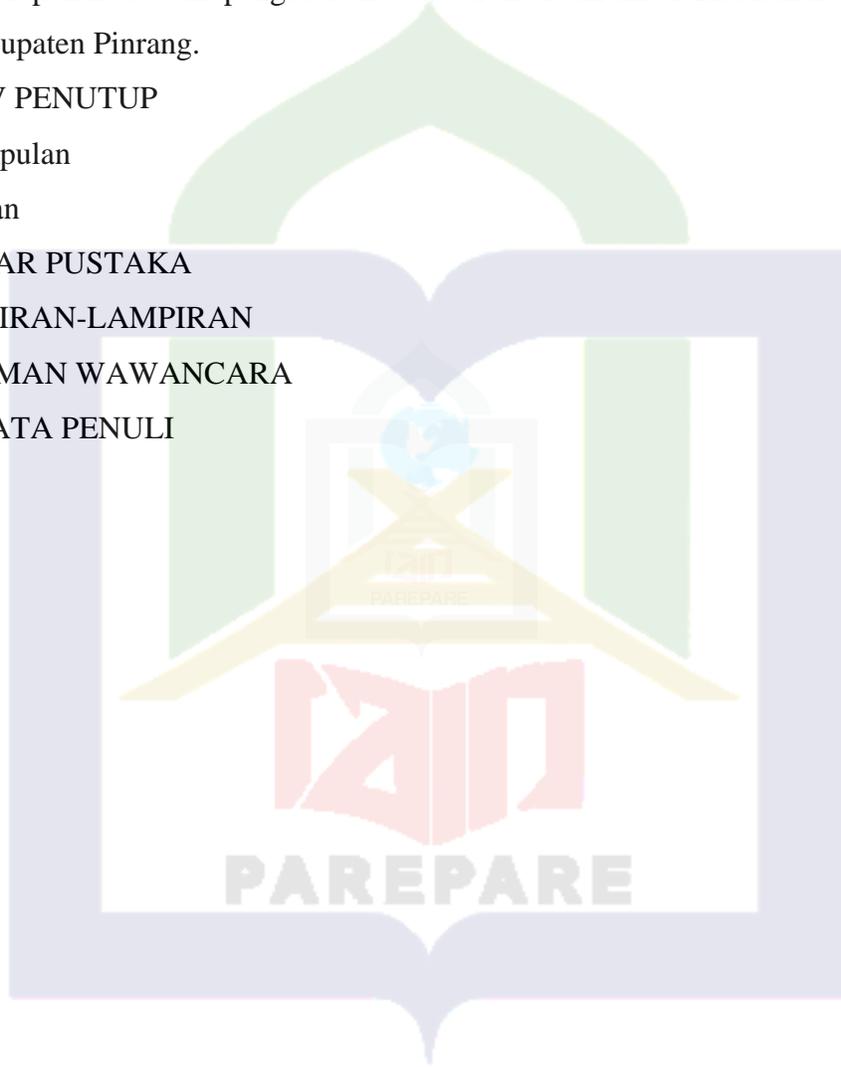
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

BIODATA PENULI



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5283/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HERAWATI
Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, 12 DESEMBER 2001
NIM : 2020203862201020
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
Semester : VII (TUJUH)
Alamat : KELURAHAN TELLUMPANUA, KECAMATAN SUPPA,
KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

STUDI PENERAPAN KODE ETIK PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL BUDAYA BUGIS "MALEMPU" NA MAPACCING" DI KELURAHAN TELLUMPANUA KAB.PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 14 September 2023



Kuzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0610/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 19-09-2023 atas nama HERAWATI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1109/RT.Teknis/DPMPTSP/09/2023, Tanggal : 19-09-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0610/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2023, Tanggal : 19-09-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti	: HERAWATI
4. Judul Penelitian	: STUDI PENERAPAN KODE ETIK PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL BUDAYA BUGIS MELEMPU NA MAPACCING DI KELURAHAN TELLUMPANUA KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 3 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: PEMERINTAH DAN MAYARAKAT KELURAHAN TELLUMPANUA
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Suppa

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 19-03-2024.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 20 September 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANTI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





Balai Sertifikasi Elektronik



CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
KELURAHAN TELLUMPANUA
Jl. Pramuka No. Lappa-lappae Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : SKTMP/266/TP/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :

Nama : **HERAWATI**
Alamat : Pinrang, 12 Desember 2001
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(i)
Jurusan/Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam
Alamat Kampus : Jl. Amal Bakti No.08 Soreang Parepare

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi pada tanggal) 19 September s/d 19 November 2023 dengan judul "*Studi Penerapan Kode Etik Pelaporan Keuangan Berbasis Kearifan Lokal " Malempu Na mapaccing" di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang*".

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lappa-lappae, 22 November 2023

LURAH,



SUAIDI SUAIB, SE
Penata Tk. I
NIP : 19691004 200701 1 023

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. TAHIR S. AK
TTL : MAKASSAR / 20 FEBRUARI 1997
Pekerjaan : PENGELOLA KEUANGAN KELURAHAN TELLUMPANUA
Agama : ISLAM
Alamat : BFTUA RAYA V NO.8 MAKASSAR

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Herawati
NIM : 2020203862201024
Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Judul Penelitian : Studi Penerapan Kode Etik Pelaporan Keuangan Berbasis Kearifan Lokal Budaya Bugis "Malempu' Na Mapaccing" Di Kelurahan Tellumpanua
Alamat : Lappa-Lappa e
Guguk Waktu : Oktober s/d November 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tellumpanua, 23 OKTOBER 2023

Responden



M. TAHIR D. S. AK

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHARUDDIN
TTL : LABILI-BILI / 10 AGUSTUS 1983
Pekerjaan : PENGOLAH DATA KELURAHAN TELLUMPANUA
Agama : ISLAM
Alamat : BTN CITRA BUANA MAS TEGAL BLOK M No.7

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Herawati
NIM : 2020203862201024
Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Judul Penelitian : Studi Penerapan Kode Etik Pelaporan Keuangan Berbasis Kearifan Lokal Budaya Bugis "Malempu' Na Mapaccing" Di Kelurahan Tellumpanua
Alamat : Lappa-Lappa e
GugukWaktu : Oktober s/d November 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tellumpanua, 23 OKTOBER 2023

Responden


SAHARUDDIN


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUELINA S.AK
TTL : LABILI-BILI / 03 JANUARI 1995
Pekerjaan : BENDAHARA KPSPAM SEPAKAT KELURAHAN TELLUMPANUA
Agama : ISLAM
Alamat : LABILI-BILI

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Herawati
NIM : 2020203862201024
Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Judul Penelitian : Studi Penerapan Kode Etik Pelaporan Keuangan Berbasis Kearifan Lokal Budaya Bugis "Malempu' Na Mapaccing" Di Kelurahan Tellumpanua
Alamat : Lappa-Lappa e
Guguk Waktu : Oktober s/d November 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tellumpanua, 29 OKTOBER 2023
Responden


.....
Nuelina


PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

NAMA MAHASISWA :HERAWATI
NIM :2020203862201024
FAKULTAS :EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI :AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JUDUL :STUDI PENERAPAN KODE ETIK AKUNTAN
BERBASIS KEARIFAN LOKAL BUDAYA BUGIS
“MALEMPU’ NA MAPACCING” PADA
PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM DI
KELURAHAN TELLUMPANUA KAB.PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala Desa beserta Perangkat Desa.

1. Berapa dana yang turun dari pemerintah pusat dan di alokasikan untuk apa saja dana tersebut? Apakah ada bidang-bidang tertentu yang mengelola dana tersebut?
2. Bagaimana proses pelaporan keuangan kelurahan? Apakah sudah sesuai dengan kode etik pelaporan keuangan?
3. Apakah pemerintah menerapkan kode etik pelaporan keuangan dalam pengelolaan dana kelurahan?
4. Apakah ada kendala dari pelaksanaan pembangunan terkait pengelolaan dana kelurahan, serta manfaatnya apa saja?
5. Menurut anda apakah pemerintah Kelurahan Tellumpanua menjadikan kearifan lokal *Malempu’ Na Mapaccing* sebagai landasan pada pelaporan keuangan?
6. Menurut anda pentingkah sebuah kearifan lokal dijadikan sebagai landasan dalam pelaporan keuangan?

Wawancara dengan Masyarakat Kelurahan Tellumpanua.

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan terkait pengelolaan dana kelurahan?
2. Apakah kearifan lokal *Malempu' Na Mapaccing* menjadi landasan pemerintah Kelurahan Tellumpanua dalam membuat pelaporan keuangan?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 23 Oktober 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Abdul Hamid, S.E., M.M.

Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak.,ACPA.,CTA

NIP : 19720929 200604 2 001

NIP : 2003029203

DATA MENTAH WAWANCARA

TRANSKIP WAWANCARA

A. Bentuk penerapan, kode etik pelaporan keuangan di Kelurahan Tellumpanua

1. Berapa dana yang turun dari pemerintah pusat? Dan apakah ada bidang-bidang tertentu yang mengelola dana tersebut?

“Iya, setelah dana yang turun dari pusat itu ada Rp. 350 juta untuk sarana dan prasarana, kemudian Rp 25 juta untuk pemberdayaan masyarakat itu kami melakukan musyawarah untuk langsung menentukan dana yang akan direalisasikan yang sudah dirancang pembangunannya sampai tahun 2023 contohnya kemudian diberikan kepada maing-masing bidang yang diberikan tanggungjawab.”_M.Tahir, S.Ak

2. Bagaimana proses pelaporan keuangan di Kelurahan Tellumpanua? Apakah sudah sesuai dengan kode etik pelaporan keuangan?

“Kami dikelurahan ini tentu punya proses pelaporan keuangan yang dilaksanakan per 3 bulan. Awal mula untuk mengajukan pencairan dana Kelurahan itu dimulai dari bendahara kelurahan itu mengajukan permintaan kepada pemerintah daerah untuk proses pencairan dana yang telah terincikan, kemudian ketika dana sudah cair dibuatkan LPJ sesuai dengan apa yang dirincikan tersebut lalu setelah dibuatkan LPJ kemudian diinput kedalam aplikasi SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah).”_M.Tahir, S.Ak

3. Apakah pemerintah menerapkan kode etik pelaporan keuangan dalam pengelolaan dana Kelurahan Tellumpanua?

“Iya, kami dikelurahan hanya terfokus pada pelaporan pertanggungjawaban anggaran, kami buat LPJ lalu pelaporan keuangannya itu di epemerintah

daerah kita cuman menginput hasil LPJ ke aplikasi yang tadi SIKD nanti pemerintah daerah yang kelola itu.”_Syaharuddin

4. Bagaimana tanggapan anda mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan terkait pengelolaan dana kelurahan?

“Sebagai masyarakat Kelurahan Tellumpanua jika dilihat dari pengelolaan dana kelurahan, pemerintah kelurahan itu sudah transparansi, karena setiap kali ada pembangunan maupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kelurahan selalu melalui musyawarah terlebih dahulu tapi mungkin ada masyarakat juga yang tidak hadir dalam musyawarah tersebut hanya menerima saja keputusan dari pemerintah kelurahan karena dianggap itulah putusan yang terbaik buat kelurahan nantinya. Kalau berbicara mengenai kode etik pelaporan saya kira sudah cukup bertanggungjawab, sudah objektivitas dalam pelaporan keuangannya dan yang paling penting bentuk fisik dari pembangunannya pun sudah terlihat.”_Hasmirati, S.ST.,
Kep

- B. Peran Kearifan Lokal “*Malempu’ Na Mapaccing*” pada pelaporan keuangan di Kelurahan Tellumpanua Kabupaten Pinrang.

1. Menurut anda apakah pemerintah Kelurahan Tellumpanua menjadikan kearifan lokal *Malempu’ Na Mapaccing* sebagai landasan pada pelaporan keuangan?

“Untuk KPSPAM sendiri kami selalu berusaha menyesuaikan dengan keadaan warga sebelum merancang sesuatu, seperti kita ketahui kita ini suku bugis banyak pesan-pesan dari orangtua yang lebih dulu menjabat dikantor ini dijadikan sebagai teladan untuk kami, dan juga sekarang itu zamannya serba canggih tidak seperti dulu sesuatu yang dikerjakan dengan tradisional, jadi intinya kami hanya menyesuaikan.”_Nurlina, S.Ak

2. Menurut anda pentingkah sebuah kearifan lokal dijadikan sebagai landasan dalam pelaporan keuangan?

“Iya betul, *Malempu’ Na Mapaccing* kami tentu akan berusaha agar jujur dan bersih dalam pelaporan keuangan karena itu berbicara tentang dana pembangunan untuk kelurahan yang harus dilaporkan sesuai yang ada dilapangan atau yang sudah direalisasikan untuk masyarakat tentunya.”_M.Tahir, S.Ak.

3. Apakah kearifan lokal “ *Malempu’ Na Mapaccing*” menjadi landasan pemerintah Kelurahan Tellumpanua dalam membuat pelaporan keuangan?

“ Menurut saya jika mengenai kejujuran pemerintah Kelurahan Tellumpanua saya tidak ragukan lagi karena selama ini pemerintah Kelurahan Tellumpanua sudah sangat transparan selalu melibatkan warga, kalau masalah bersih saya kurang tau karena kita tidak bisa menilai ini orang bersih dengan begitu saja, tapi jika untuk saya akhlak lebih utama salah satunya itu bersikap jujur.”_Nawir Usman Isa.

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Suardi Suaib, SE, selaku Lurah Tellumpanua.



Wawancara dengan M. Tahir, S.Ak, selaku pengelola keuangan pembantu Kelurahan Tellumpanua.



Wawancara dengan Syaharuddin, selaku pengelola barang pembantu Kelurahan Tellumpanua.



Wawancara dengan Nurlina, S.Ak, selaku bendahara KPSPAM SEPAKAT Kelurahan Tellumpanua.



Wawancara dengan Hasmirati, S.ST, selaku masyarakat Kelurahan Tellumpanua



Wawancara dengan Nawir Usman Isa, selaku masyarakat Kelurahan Tellumpanua.



BIODATA PENULIS



Herawati, lahir pada tanggal 12 Desember 2001. Alamat di Lappa-Lappa e Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kab.Pinrang. Anak ketiga dari tiga bersaudara. Ayah bernama H. Halide dan Ibu bernama Hj. Mahirah. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2008 menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 102 Pinrang, kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Suppaa. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Pinrang. Pendidikan S1 ditempuh di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul “*Studi Penerapan Kode Etik Pelaporan Keuangan Berbasis Kearifan Lokal Budaya Bugis ‘Malempu’ Na Mapaccing*” Di Kelurahan Tellumpanua Kab. Pinrang”.